KAJIAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENINGKATKAN EKONOMI SIRKULAR MELALUI POTENSI WIARAUSAHA SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

LAPORA AKHIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... v
DAFTAR BAGAN..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 8
1.3. Manfaat dan Tujuan Penyusunan Kajian 8
1.4. Sasaran Kegiatan Penelitian 9
1.5. Keluaran 9

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK PRAKTIS 10
2.1. Strategi 10
2.1.1. Pengertian Strategi 10
2.1.2. Bentuk-Bentuk Strategi 11
2.1.3. Implementasi Strategi 13
2.2. Kebijakan 16
2.2.1. Pengertian Kebijakan 16
2.2.2. Kebijakan Pemerintah 18
2.2.3. Pemerintah Daerah 20
2.2.4. Analisis Kebijakan Publik 21
2.3. Ekonomi Sirkular 25
2.3.1. Pengertian Ekonomi Sirkular 25
2.3.2. Perbedaan Ekonomi Sirkular dengan Ekonomi Linier… 27
2.3.3. Model Ekonomi Sirkular 29
2.4. Wirausaha Sosial 31
2.4.1. Pengertian Wirausaha Sosial 31
2.4.2. Model Wirausaha Sosial 34
2.4.3. Kewirausahaan Sosial dan Pembangunan Masyarakat 35

2.5. Strategi dan Kebijakan dalam Meningkatkan Ekonomi Sirkular melalui Wirausaha Sosial …….. 36
2.5.1. Model Ekonomi Sirkular ……. 36
2.5.2. Keunikan Ekonomi Sirkular …… 38
2.5.3. Lintas Sektoral …… 39
2.5.4. Penerapan Ekonomi Sirkular …….. 40
2.6. Dasar Hukum Ekonomi Sirkular …… 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN …… 46
3.1. Pendekatan Penelitian …….. 46
3.2. Jenis Penelitian …….. 47
3.3. Sumber Data …….. 47
3.4. Teknik Pengumpulan Data …….. 48
3.5. Narasumber Penelitian …… 49
3.6. Teknik Analisis Data …… 52
3.6.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal ……. 53
3.6.2. Penyusunan Kuesioner …… 53
3.6.3. Penentuan Responden dan Pengisian Kuesioner …… 54
3.6.4. Analisis Data ……... 55

BAB IV POTENSI EKONOMI SIRKULAR DAN WIRAUSAHA SOSIAL…….. 65
4.1. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya……..... 65
4.1.1. Sejarah Kota Tasikmalaya……. 65
4.1.2. Keadaan Geografis Kota Tasikmalaya…….. 67
4.1.3. Keadaan Geografis dan Sosial Kota Tasikmalaya……. 71
4.2. Dasar Hukum Kegiatan Kajian Persampahan…… 73
4.3. Penerapan Ekonomi Sirkular……... 75
4.3.1. Keunikan Ekonomi Sirkular…….. 75
4.3.2. Lintas Sektoral……... 76
4.3.3. Penerapan Ekonomi Sirkular……. 76
4.4. Pengembangan PotensiKewirausahaan Sosial…… 82

4.4.1. Dasar Hukum……. 82
4.4.2. Pengembangan Ekonomi Sirkular Melalui Kewirausahaan Sosial……... 84
4.4.3. Data Pendukung…… 88
4.5. Model Ekonomi Sirkular Berbasis Kewirausahaan Sosial…... 93
4.5.1. Pengembangan Magot…… 93
4.5.2. Bank Sampah…….. 97
4.6. Analisi SWOT…….. 105
4.7. Peta Jalan dan Analisis Kebutuhan……... 112

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI…… 116
5.1. Kesimpulan..…… 116
5.2. Rekomendasi……. 118

DAFTAR PUSTAKA …….. 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Perundang-Undangan Ekonomi Sirkular……..	41
Tabel 3.1	Kriteria Sampel Ahli…….	51
Tabel 3.2	Matrik Faktor Internal dan Eksternal……	56
Tabel 4.1	Prosentase Sampah Kota Tasikmalaya…….	88
Tabel 4.2	Sarana Pengangkut Sampah……..	89
Tabel 4.3	Sarana Alat Berat…..……	90
Tabel 4.4	Timbunan Sampah Kota Tasikmalaya …….	91
Tabel 4.5	Jumlah Sampah Masuk TPA Ciangir……	91
Tabel 4.6	Peternak dan Produksi Magot……	95
Tabel 4.7	Daftar Bank Sampah……	98
Tabel 4.8	Bank Sampah Induk.……	99
Tabel 4.9	IFAS…….	107
Tabel 4.10	EFAS……	108
Tabel 4.11	Analisi Matrik SWOT…..……	109
Tabel 4.12	Analisis Kebutuhan……. ……	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kota Tasikmalaya……..	68
Gambar 4.2	Geografi dan Iklim...…….	69
Gambar 4.3	Luas Derah Menurut Kecamatan…..……	70
Gambar 4.4	Penduduk dan Katagori Pekerjaan…..…….	72
Gambar 4.5	Model Ekonomi Sirkular……..	85
Gambar 4.6	TPA Ciangir……..……	92
Gambar 4.7	Model Ekonomi Sirkular Kota Tasikmalaya……	93
Gambar 4.8	BSF……	94
Gambar 4.9	Rumah BSF……...……	95
Gambar 4.10	Magot……	96
Gambar 4.11	Bank Sampah…….……	100

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kebijakan, Kepatuhan dan Kebijaksanaan…..……..	22
Bagan 2.2.	Sekuensi Implementasi Kebijkakan……..	24
Bagan 2.3	Perbedaan Ekonomi Sirkular dan Linier……	28
Bagan 2.4	Tiga Prinsip Utama Ekonomi Sirkular…..…….	29
Bagan 2.5	Model Ekonomi Sirkular……..	37
Bagan 4.1	Prinsip Ekonomi Sirkular pada Pengolahan Sampah……..	98
Bagan 4.2	Diagram Alir Pemilahan Sampah di Bank Sampah..……	101

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan penelusuran formula ideal dan sebuah strategi menuju perubahan wujud kondisi masyarakat secara ideal dan menentukan cara mewujudkannya. Secara formal beban ini menjadi tugas sebuah negara melalui sistem pemerintahan yang terdapat pada target pencapaiannya, sehingga dalam kurun waktu yang ditentukan, pemerintahan suatu negara melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat tersebut menuju keadaan yang lebih baik. Pada suatu negara, pembangunan menjadi fokus utama yang dilakukan pada berbagai sektor. Jika hanya salah satu sektor yang diperhatikan maka dipastikan keadaan negara tersebut akan rapuh. Oleh sebab itu, bukan hanya pemerintahan yang memiliki peran dalam pembangunan melainkan masyarakat pun mengambil bagian menjadi peran penting yang turut serta mewujudkan suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan individu atau kelompok yang merasakan secara langsung dampak manfaat suatu pembangunan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan yang mana masyarakat terlibat didalamnya. Dalam rantai ekonomi peran masyarakat adalah dalam skema memenuhi kebutuhannya. Masyarakat memenuhi kebutuhannya setiap saat. Bermacam kebutuhan masyarakat membuat kuantitas kebutuhan berbeda antara suatu barang dengan barang lainnya.

Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi permasalah tersebut adalah pengembangan ekonomi sirkular melalui pengembangan kewirausahaan sosial. Ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalkan penggunaan materi dan sumber daya sekaligus mendorong agar suatu produk memiliki daya guna selama mungkin dengan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi. Dengan demikian, konsep ekonomi sirkular bukan hanya sekedar pengelolaan limbah yang lebih baik, melainkan mencakup serangkaian intervensi yang holistik dari hulu hingga hilir dengan meningkatkan efisiensi dari penggunaan sumber daya di setiap rantai nilai kegiatan ekonomi. Merujuk pada keprihatinan terhadap perkembangan kewirausahaan di Indonesia yang hanya berorientasi kepada profit semata, maka diperlukan sebuah konsep enterprenuer yang menekankan kepada tanggungjawab untuk turut melestarikan keberlanjutan manusia secara umum dengan menggunakan bahan-bahan dasar produksi yang layak dan distribusi produk yang baik, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dinamika pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah untuk menjembatani antara kepentingan hidup manusia dengan kepentingan menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan. Salah satu pendekatan yang sedang diperbincangankan oleh kalangan akademisi, peneliti dan praktisi dalam perspektif strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah ekonomi sirkular. Secara konseptual ekonomi sirkuar mengacu pada upaya mengurangi input, limbah, emisi dan energi melalui suatu kegiatan berbasis *inovasi looping* yang mencakup *slowing*,

closing, narrowing material dan *energy loop*.[1] Ekonomi sirkular merupakan salah satu upaya untuk mengurangi limbah dan memperbaiki lingkungan. Ekonomi sirkular memaksimalkan manfaat bersama antara ekonomi dan lingkungan. Ekonomi sirkular mengadopsi peluang sirkularitas di lima sektor utama ekonomi yaitu makanan & minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir & eceran, dan peralatan listrik & elektronik dapat menjadi komponen kunci dari pemulihan ekonomi, membantu memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan biaya rumah tangga, dan melestarikan lingkungan.[2]

Menurut Kirchherr et.al (2017) ekonomi sirkular seringkali digambarkan sebagai sistem ekonomi yang mengkombinasikan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang yang memerlukan perubahan sistemik dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai ekonomi, kualitas lingkungan, dampaknya terhadap keadilan sosial dan generasi mendatang. Dalam konsep ini, model bisnis maupun konsumen juga mengambil peran penting dalam mendukung ekonomi sirkular.[3] Menurut Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi", terdapat 5 model bisnis ekonomi sirkuler beserta tantangannya. Kelima model bisnis tersebut adalah Model Bisnis Rantai Pasok /sirkuler, Model Bisnis Pemulihan dan Daur Ulang, Model Bisnis Produk Tahan Lama, Model Bisnis Sewa, dan Model Bisnis Produk Sebagai Jasa.[4]

---

[1] Geissdoerfer M, Morioka SN, de Carvalho MM, Evans S. Business models and supply chains for the circular economy.*(Journal of Cleaner Production, 2018).* Hal. 190: 172-190.

[2] Lacy, P., Long, J. & Spindler, W. *The Circular Economy Handbook.* (Palgrave Macmillan London, 2020). Hal. 20

[3] Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. (*Resources, Conservation and Recycling Journal, vol. 127, 2017*). Hal. 221-232.

[4] Keraf, AS. (2022). *Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022). Hal.57-89.

Ekonomi sirkular didefinisikan sebagai model ekonomi yang menargetkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan limbah, menghasilkan produk dalam jangka waktu yang lama serta bertujuan untuk meningkatkan manfaat sosio-ekonomik yang bersahabat dengan keadaan lingkungan (Morseletto, 2020). Model ekonomi sirkular merupakan salah satu model yang mendukung SDGs dalam mengupayakan peningkatan *zero waste* hingga tahun 2030.[5] SDGs merupakan keberlanjutan yaitu agenda pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan, yang kemudian dibagi ke dalam 169 target. Semua target direncanakan tercapai sampai dengan tahun 2030, dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Adapun 17 tujuan SDGs adalah: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pertumbuhan pelaku wirausaha menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dalam masyarakat. Kewirausahaan menjadi mesin penggerak yang mendorong sebagian besar pertumbuhan sektor bisnis serta pendorong di balik perluasan pesat sektor sosial.

[5] Morseletto, P. *Targets for a Circular Economy*. (Resources, Conservation & Recycling, 2020). Hal. 153, 1-12

Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan diantaranya adalah Kewirausahaan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini melibatkan penciptaan solusi inovatif untuk masalah-masalah sosial dan mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan.[6] Kewirausahaan sosial memobilisasi individu dengan sumber daya keuangan yang kecil untuk mendukung produksi berbasis masyarakat, yang pada gilirannya mendukung peningkatan pendapatan dan pola produksi yang ramah lingkungan.[7] Ekosistem kewirausahaan sosial di sektor kerajinan, seperti yang ada di Gujarat, India, telah memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali dan mempertahankan kerajinan tradisional sebagai komoditas ekonomi.[8] Kewirausahaan sosial telah terbukti berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan nilai melalui inovasi. [9] Namun, penting untuk menyadari bahwa tidak semua dampak kewirausahaan sosial bersifat positif.[10] Untuk memastikan bahwa kewirausahaan sosial berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan, sangat penting untuk menilai

[6] Seelos, C., & Mair, J. *Social entrepreneurship-The contribution of individual entrepreneurs to sustainable development.* (IESE Business School, University of Navarra, Navarra, Spain, 2004). Hal. 12.

[7] Konda, I., Starc, J., & Rodica, B. *Social Challenges are Opportunities for Sustainable Development: Tracing Impacts of Social Entrepreneurship Throug Innovations and Value Creation.* (Economic Themes, 2015). Hal. 211– 229.

[8] Pathak, S., & Mukherjee, S. Entrepreneurial ecosystem and social entrepreneurship: case studies of community-based craft from Kutch, India. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 15(3), 2020.* Hal. 350–374

[9] Wang, W. *Toward Economic Growth and Value Creation Through Social Entrepreneurship: Modelling the Mediating Role of Innovation*. (Frontiers in Psychology, 2020). Hal. 13.

[10] Andersson, F. O., & Ford, M. Reframing social entrepreneurship impact: Productive, unproductive and destructive outputs and outcomes of the Milwaukee school voucher programme. *(Journal of Social Entrepreneurship, 6(3), 2015)*. Hal. 299–319

dampaknya melalui lensa multi-dimensi dan mempertimbangkan peran inovasi dan faktor kontekstual lainnya. [11]

Kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada penciptaan nilai sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, wirausaha sosial berkontribusi pada SDGs dengan berbagai cara, seperti mengurangi kemiskinan, mendorong kesetaraan gender, memastikan pendidikan berkualitas, dan membina masyarakat yang berkelanjutan (Dodo et al., 2021; Goyal et al., 2021; Schmiedeknecht, 2019).[12] Wirausaha sosial telah terbukti memberikan solusi terukur untuk mengatasi masalah terkait SDG dengan menggunakan teknologi digital, membentuk kemitraan yang luas, dan berfokus pada inovasi sosial dan model bisnis yang dapat diakses, terjangkau, dan tersedia bagi pengguna akhir. [13]

Kesimpulannya, kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam mencapai SDGs dengan mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada penciptaan nilai sosial, membina kemitraan, dan mempromosikan pendidikan dalam kewirausahaan sosial, inisiatif-inisiatif ini berkontribusi pada upaya global untuk mencapai SDG dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.

---

[11] Cui, J. *The impact of entrepreneurship curriculum with teaching models on sustainable development of entrepreneurial mindset among higher education students in China: the moderating role of the entrepreneurial climate at the institution*. (Sustainability, 2021).Hal. 13(14), 7950.

[12] Dodo, F., Raimi, L., & Rajah, E. B. *Social entrepreneurship and SDGs: Case studies from northeast Nigeria*. (Emerald Emerging Markets Case Studies, 2021). Hal. 11(4), 1–38.

[13] Goyal, S., Agrawal, A., & Sergi, B. S. Social entrepreneurship for scalable solutions addressing sustainable development goals (SDGs) at BoP in India. *(Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 2021)*. Hal. 16(3/4), 509–529.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang padat penduduk dan beragam di Asia Tenggara, tidak asing dengan berbagai tantangan yang diuraikan oleh SDGs. Meskipun negara ini telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang, Indonesia masih terus bergulat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, mengembangkan pendekatan inovatif yang memprioritaskan hasil sosial dan lingkungan yang positif sambil memastikan kelangsungan ekonomi menjadi sangat penting. (Coyanda, 2020[14]; Febrian & Maulina, 2018[15]; Margiono & Feranita, 2021[16]; Purwati et al., 2021[17]).

Kewirausahaan sosial, sebuah gerakan yang sedang berkembang di persimpangan antara bisnis dan dampak sosial, menawarkan jalan yang potensial untuk mempercepat kemajuan menuju SDG di Indonesia. [18] Wirausaha sosial adalah individu atau organisasi yang berupaya mengatasi masalah sosial dan lingkungan melalui model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, menciptakan perubahan dan dampak positif di tingkat akar rumput. Dengan menanamkan prinsip-prinsip kewirausahaan ke dalam usaha mereka, para pembuat perubahan ini

[14] Coyanda, J. R. Model Technopreneur IT Mahasiswa Pada Masa Pandemic Covid 19 dengan Metode Business Model Canvas. *(Jurnal Ilmiah Informatika Global, 2020).* 11(1), 27–32. https://doi.org/10.36982/jig.v11i1.1069

[15] Febrian, A. F., & Maulina, E. *The influence of social capital and financial capability on sustainable competitive advantage through entrepreneurial orientation: Empirical evidence from Small and Medium Industries in Indonesia using PLS-SEM, 2018.* Hal. 5(12), 218–232.

[16] Margiono, A., & Feranita, F. *The past, present, and future of social entrepreneurship in Indonesia: A strategy to move the ecosystem forward. Entrepreneurial Connectivity: Network, Innovation and Strategy Perspectives,* 2021. Hal. 29–40.

[17] Purwati, A., Budiyanto, B., Suhermin, S., & Hamzah, M.The effect of innovation capability on business performance: The role of social capital and entrep reneurial leadership on SMEs in Indonesia. *Accounting, 2021*. Hal. 7(2), 323–330.

[18] Iskandar, Y., & Kaltum, U. *The Relationship between Intellectual Capital and Performance of Social Enterprises: A Literature Review.* 2021.

berusaha untuk membangun usaha mandiri yang mendorong transformasi positif dalam komunitas mereka.

Dalam rangka pembngunan yang berkesinambungan harus selalu mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus membangun wirausaha sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai dengan berdaya dan berkreasi sendiri meningkatkan perekonomiannya.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kondisi ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
2. Potensi ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
3. Tantangan dan peluang ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
4. Ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
5. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kajian

Maksud disusunya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berasal dari pengembangan wirausaha sosial. Tujuan peyusunan kajian strategi dan kebijakan meningkatkan

ekonomi sirkular melalui potensi wirausaha sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kondisi ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
b. Untuk mengetahui potensi ekonomi sirkular yang disebabkan oleh wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
c. Untuk mengetahui tantangan dan peluang ekonomi sirkular yang disebabkan oleh wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
d. Untuk mengembangkan ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
e. Untuk menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi sirkular yang disebabkan wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.

1.4. Sasaran Kegiatan Penelitian

Sasaran kegiatan penelitian strategi dan kebijakan meningkatkan ekonomi sirkular melalui potensi wirausaha sosial Kota Tasikmalaya adalah masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya para pelaku wirausaha sosial, sehingga akan tersedia dokumen pengembangan ekonomi dan peta sebaran wirausaha sosial.

1.5. Keluaran

Keluaran penelitian ini adalah:

a. Tersedianya dokumen strategi dan kebijakan meningkatkan ekonomi sirkular melalui potensi wirausaha sosial Kota Tasikmalaya.
b. Peta sebaran wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK PRAKTIS

2.1. Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategia (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tetentu.[19] Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.[20]

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.[21] Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil

[19] Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008. Hal..3.
[20] Ali Hasan. Marketing Bank Syariah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hal.29.
[21] David. Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Selemba Empat, 2004. Hal. 14.

untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.[22]

Strategi didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah presfektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.[23] Kelemahan utama strategi adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

[22] Hitt Michael, dkk. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Erlangga, 1997. Hal.137.
[23] Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. Hal. 2.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk startegi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.[24]

1. Strategi Manajemen.

   Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, startegi mengenai keuangan.

2. Strategi Invenstasi.

   Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu devisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis.

   Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategistrategi yang berhubungan dengan keuangan.

   Selain itu, Salusu, dalam bukunya menambahkan bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu:

[24] Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Cet-14, 1997. Hal. 12.

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis.
2. *Program Strategy* (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.
3. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
4. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Keempat tipe-tipe strategi di atas dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kotten menyebutkan salah satu tipe strategi yaitu tipe strategi pendukung sumber daya yang mencakup salah satunya tenaga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi atau perusahaan.[25]

2.1.3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi (*strategy implementation*), yaitu proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.[26]

[25] Fred R. David. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998. Hal. 23.
[26] Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. Hal. 54.

1. Program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan prencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturasi perusahaan, perubahan budaya unternal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru.
2. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sekaligus menentukan laporan keuangan proforma yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan.
3. Prosedur atau *Standard Operating Procedures* (SOP), yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program perusahan.
4. Evaluasi dan kontrol, yaitu membandingkan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas.

Model proses manajemen strategik meliputi tiga tahap: 1. Tahap formulasi strategi, yaitu pembuatan pernyataan visi, misi, dan tujuan, 2. Tahap implementasi strategi, yaitu proses penerjamahan strategi dalam tindakan-tindakan; 3. Tahap evaluasi strategi, yaitu proses evaluasi bahwa implementasi strategi dapat mencapai tujuan atau tidak.

1. Visi, Misi, dan Tujuan.

   Pernyataan visi yang baik mengungkapkan pelanggan, produk atau jasa, teknologi, pasar, pemikiran untuk karyawan, pemikiran untuk citra publik,

masyarakat, dan perusahaan. Empat proses perumusan visi, yaitu: tentukan rentang waktu dan lingkup analisis secara tepat; identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang memengaruhi masa depan; identifikasi kondisi persaingan; evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Misi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan mencakup: publik atau pengguna jasa yang hendak dilayani; jasa utama yang ditawarkan; wilayah geografis yang dilayani; komitmen institusi terhadap pilihan teknologi; komitmen organisasi terhadap elternatif tujuan; elemen dalam filosofi organisasi; konsep kedirian dan citra institusi.

2. Analisis Lingkungan Makro.

Analisi lingkungan eksternal merupakan aktivitas memonitor dan mengevalusi lingkungan eksternal dan internal organisasi kepada orang-orang pnting yang ada diperusahaan. Lingkungan tersebut digunakan metode SWOT (*Strength and weaknesses* lingkungan internal, *Opportunities and Threats* untuk analisi lingkungan eksternal).

a. Analisis Lingkungan Internal.

Dalam proses perumusan strategi, perusahaan perlu melakukan identifikasi dan evaluasi atas lingkungan bisnis peusahaan. Hasil identifikasi dan evaluasi diharapkan dapat mengetahui profil keunggulan strategi perusahaan yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi peluang bisnis dan menyikapi ancaman bisnis yang ada dengan cepat.

b. Analisis SWOT Tujuan dalam menentukan strategi yang digunakan dari hasil SWOT hanya menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk

menetapkan strategi yang terbaik. Tidak semua strategi dalam SWOT dapat dipilih untuk dikembangkan.

Terdapat 4 strategi yang bisa dikembangkan yaitu:[27]

Strategi SO : strategi yang memanfaatkan kekuatan agar peluang yang ada bisa dimanfaatkan.

Strategi WO : strategi yang mencoba meminimalkan kelemahan atau memperbaiki kelemahan dalam rangka mencoba meraih peluang yang ada.

Strategi ST : strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencoba mengatasi atau memeperkecil ancaman yang dihadapi.

Strategi WT : strategi yang mencoba meminimalkan atau mengurangi kelemahan dalam rangka mencegah ancaman yang dihadapi.

2.2. Kebijakan

2.2.1. Pengetian Kebijkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan telah diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.[28]

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun

[27] Taufik Amir. *Manajemen Strategi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hal. 192.

[28] Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Hal. 190

lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law*, *social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.[29]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dijelaskan pada pasal 2 ayat (3) huruf a bahwa kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.[30] Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Peyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terdapat pada pasal 1 angka 12 bahwa kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.[31]

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan diskresi, berdasarkan definisi dan terminologi, diskresi terbagi menjadi dua yaitu: kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

[29] Noeng Muhadjir. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000. Hal. 15

[30] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi

[31] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Peyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

sedangkan kebijaksanaan adalah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan namun tetap dalam koridor hukum.[32] Kebijakan sendiri telah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis

Dalam penyusunan kebijakan harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi.
2. Konsisten dengan kebijakan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.

2.2.2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan *(public policy is whatever governments choose to do or not to do)*.[33] Kebijakan memang suatu keharusan yang dilakukan pemerintah guna dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama baik memberi dampak manfaat dalam skala besar maupun kecil. Bentuk

[32] Marwan Effendi. *Teori hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Refferensi*. Jakarta, 2013. Hal. 288.

[33] AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pusaka Pelajar, 2005.Yogyakarta. Hal. 2

kebijakan pemerintah pada dasarnya memiliki bentuk yang banyak, salah satu bentuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan publik dengan peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi secara formal dan legal. Bentuk kebijakan ini disederhanakan menjadi tiga yaitu:[34]

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar seperti undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;
2. Kebijakan publik bersifat messo atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota;
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat di bawah menteri, gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik, yaitu ucapan pejabat publik di depan publik sebagai berikut:

1. Berisikan kebenaran.
2. Konsistensi.
3. Apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus segera diimplementasikan oleh struktur dibawahnya, sudah dikomunikasikan dahulu dengan struktur dibawahnya, dan sudah siap dengan manejemen implementasinya.

[34] Riant Nugroho. *Public Policy (edisi revisi*). PT. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2009. Hal. 92

4. Apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakan adalah konsep atau rencana.

2.2.3. Pemerintah Daerah

Di Indonesia mulanya desentralisasi/otonomi daerah yaitu dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, yaitu adanya kewenangan yang disentralisasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah dan masyarakat didaerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab. Adapun yang tidak diserahkan kepada daerah yaitu masalah agama, politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, dan fiskal.

Menurut Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

1. Istilah pemerintahan menunjukan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas penting.
2. Istilah pemerintah menunjukan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi tersebut.

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempat, sebagai berikut:

1. Pemerintahan, dalam arti luas: Segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan Negara yang kalau mengikuti pembidangan Montesquiue meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pemerintah, dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang eksekutif saja.

Pemerintah daerah melaksanakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantu. Dan ketiga asas ini pun dilaksanakan secara bersama-sama. Asas desentralisasi memberikan wewenang kepala daerah untuk melasakan segala urusan otonomi sesuai dengan kebuthhan, keinginan, dan kemampuan daerah masing-masing.[35] Jadi pemerintah daerah adalah suatu badan atau organisasi yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan di suatu daerah. Untuk mengurus segala urusan yang berada di daerah tersebut.

2.2.4. Analisis Kebijakan Publik

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy).* Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan, perbedaan tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:[36]

[35] Thoha, M. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PD.Batang Gadis, 1995.Hal 28

[36] Wahab. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Hal. 153

Bagan 2.1. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan

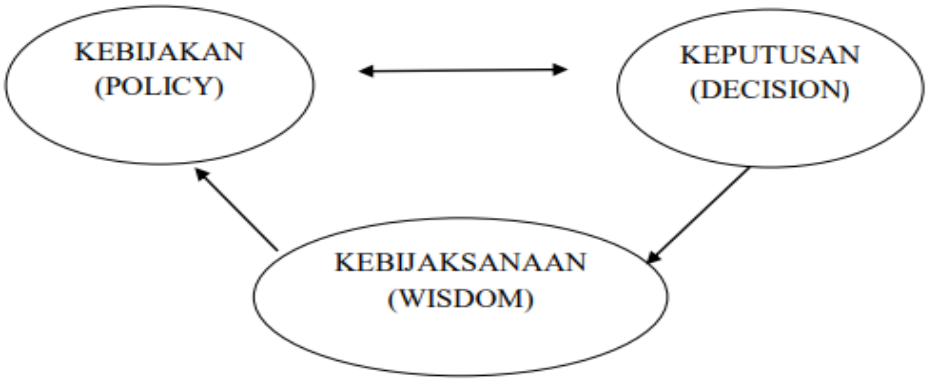

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau warga Negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan Untuk lebih memamahi kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik.untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Menurut Bardach bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktifitas politik dan sosial.[37] Hal ini berarti dalam analisis kebijakan perlu dipahami masalah-masalah yang bersifat politis dan sosial. Kemudian Palto dan Sawicky sebagaimana dikutip

[37] Eugene Bardach. *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. New York: Seven Bridges Press, 2000). Hal.13

Riant Nugroho menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan tindakan yang diperlukan untuk membuat suatu kenijakan, baik kebijakan yang baru maupun kebijakan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang ada.[38]

Sementara analisis kebijakan menurut William N.Dunn bahwa analisis kebijakan adalah:

> *Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methodee, and substantive findings of the behavioral and social sciences, social professional and political philosophy, as is usual with complex activities there are several ways to define policy analisis. The one adopted here is that policy analysis is a process multidisciplinary inquiry designed to create, critically assess, and coinicate information that is useful in understanding and improving policies.*

Pendapat Dunn ini juga dikutip dalam Nanang Fattah bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode dan substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu *social*, profesi *social*, dan filosofi *social* politis yang dilakukan dengan cara tertentu. Beberapa cara untuk menggambarkan analisis kebijakan. Salah satu yang diadopsi di sini bahwa analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.[39]

Implementasi kebijakan dikemukakan oleh Nugroho yaitu: “Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program di bawah ini:

---

[38] Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo, Tahun 2008. Hal.84
[39] Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo, Tahun 2008. Hal.84

Bagan 2.1. Sekuensi Implemetasi Kebijakan[40]

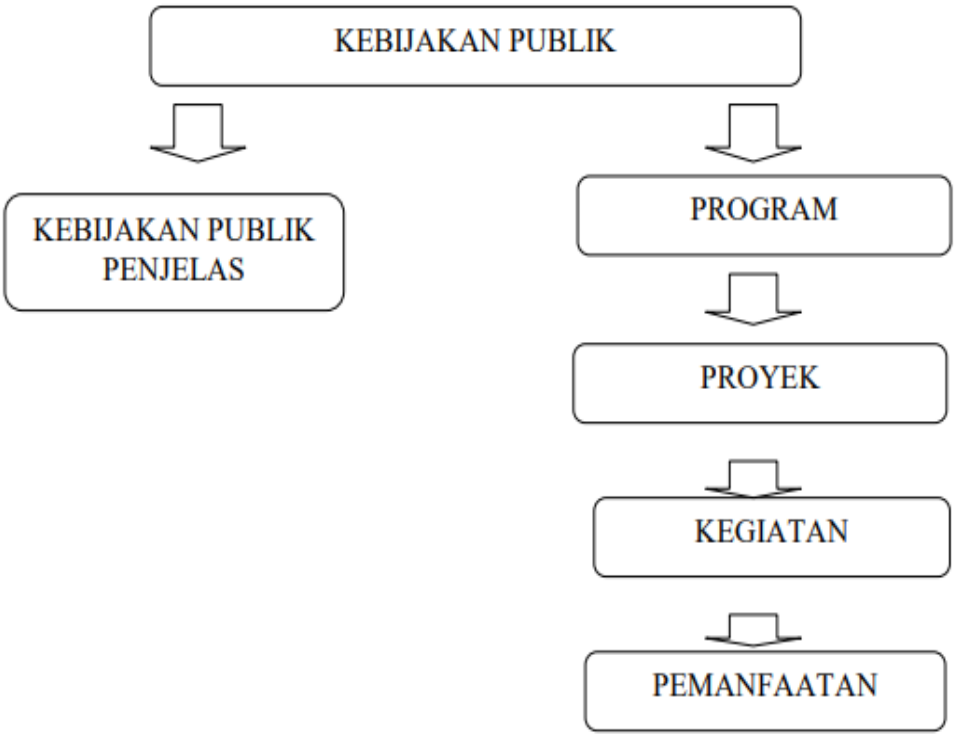

Gambar di atas menunjukann bahwa penerapan kebijakan dimulai dari penyusunan visi dan misi sebagai tujuan jangka panjang yang dicapai. Kemudian bagaiana strategi untuk mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan membuat program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berkaitan dengan program dan kegiatan yang dirancang harus sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan.

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan dan didukung oleh aktor kebijakan dan semua orang yang terkait bisa dalam bentuk program dan kegiatan pada lembaga yang melaksanakannya. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu *resources*

[40] Rian Nugroho. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009. Hal 619.

yaitu aktor kebijakan harus dapat mengelola dan menggerakan seluruh potensi potensi atau sumber daya yang tersedia untuk mendukung kebijakan. Faktor terakhir dalam penerapan kebijakan adalah memilih arena atau tempat yang tepat untuk melaksanakan kebijakan. Pemilihan arena atau tempat sangat ditentukan dengan pertimbangan wilayah tertentu akan berbeda dengan wilayah lain, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan arena atau tempat untuk implementasi kebijakan dapat menentukan kinerja kebijakan karena suatu wilayah akan mempunyai kondisi yang berbeda baik unsur politik, sosial, ekonomi dan budaya.

2.3. Ekonomi Sirkular

2.3.1. Pengertian Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular didefinisikan sebagai sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.[41] Ekonomi sirkular bukan hanya berupa pengelolaan limbah yang lebih baik melalui praktik daur ulang, namun juga mencakup serangkaian intervensi di seluruh rantai pasok.[42]

Menurut Kirchherr et.al (2017:221) ekonomi sirkular seringkali digambarkan sebagai sistem ekonomi yang mengkombinasikan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang yang memerlukan perubahan sistemik dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai ekonomi,

[41] Ellen MacArthur Foundation. *Towards a Circular Economy*. Business Rationale for an Accelerated Transition, 2015. Hal. 2

[42] Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Kerajaan Denmark, UNDP Indonesia. *Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia*, 2021. Hal. 8.

kualitas lingkungan, dampaknya terhadap keadilan sosial dan generasi mendatang. Dalam konsep ini, model bisnis maupun konsumen juga mengambil peran penting dalam mendukung ekonomi sirkular.[43]

Ekonomi sirkular adalah pendekatan sistemik untuk pembangunan ekonomi yang dirancang untuk memberi manfaat bagi bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Pendekatan sistem ekonomi melingkar ini memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Konsep ekonomi sirkular harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi melalui industrialisasi dengan tujuan menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah, yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Prinsip utama konsep ekonomi sirkular adalah meminimalisasi eksternalitas negatif, berupa limbah buangan hasil konsumsi dan produksi untuk diregenerasikan kembali menjadi produk yang bernilai manfaat.[44] Ekonomi sirkular merupakan salah satu sistem yang dapat memitigasi kerusakan lingkungan dengan mengeliminasi jejak karbon berupa limbah buangan.[45] Untuk mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah memiliki hambatan. Hal ini disebabkan karena perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, hambatan tersebut meliputi regulasi yang tidak tegas, minimnya pendidikan dan edukasi mengenai ketahanan lingkungan, minimnya

[43] Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling Journal, vol. 127, 2017*. Hal. 221-232.

[44] Coletta, V. R. et al. 2021. Causal Loop Diagrams for Supporting Nature Based Solutions Participatory Design and Performance Assessment. *Journal 0f Environmental Management, 2021. p. 280. Doi: 10.1016/J.Jenvman.2020.111668.*

[45] Camarsa, G. et al. LIFE and the Circular Economy', in Life Environment. *European Commission Environment Directorate- GeneraL, 2017. p. 104. doi: 10.2779/29436*

tuntutan pasar karena masih berorietnasi kepada profit semata.[46] (Zhang et al., 2019).

Ekonomi sirkular menawarkan peluang untuk pertumbuhan yang lebih baik, model ekonomi ini dinilai tangguh, terdistribusi, beragam, dan inklusif. Konsep ini diharapkan dapat menangani penyebab tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, dan menciptakan ekonomi di mana tidak ada produksi limbah dan regeneratif dengan desain. Saat industri memulai transisi mereka menuju ekonomi sirkular, pemerintah mengembangkan peta jalan dan strategi ekonomi sirkular, baik di seluruh ekonomi maupun berbasis sektor. Kegiatan ini sangat penting untuk menskalakan transisi, dan saat momentum terbangun, sangat penting untuk menyepakati arah perjalanan yang jelas yang mengurangi fragmentasi dan kompleksitas, dan mempertimbangkan sifat global rantai pasokan serta sistem produksi dan konsumsi.[47]

2.3.2. Perbedaan Ekonomi Sirkular dengan Ekonomi Linier

Perbedaan antara ekonomi sirkular dan ekonomi linear terletak pada efisiensi produk dari mulai produksi sampai ke akhir siklus produk. Dalam ekonomi linear, produk didesain untuk dibuat, dipakai, dan dibuang (prinsip *take-make-dispose*), sehingga produsen terus menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru, dengan asumsi bahwa sumber daya alam tak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi sirkular, nilai manfaat sebuah produk sejatinya dapat terus dimanfaatkan dalam sebuah siklus sehingga dapat memperpanjang masa pakai

[46] Zhang, A. Et Al. 2019. Barriers to Smart Waste Management for A Circular Economy in China. *Journal of Cleaner Production, 2019. p.240. P. 118198. Doi: 10.1016/J.Jclepro.2019.118198*

[47] Macarthur, E. 2021. *Universal Circular Economy Policy Goals*. In Ellen Macarthur Foundation, 2021. Hal. 20

produk tersebut. Ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalisir jumlah penggunaan sumber daya dan jumlah produk yang akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui penggunaan ulang dan efisiensi semua sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan dalam sebuah siklus produk seperti diilustrasikan sebagai berikut:

Bagan. 2.3. Perbedaan Ekonomi Linear dan Ekonomi Sirkular[48]

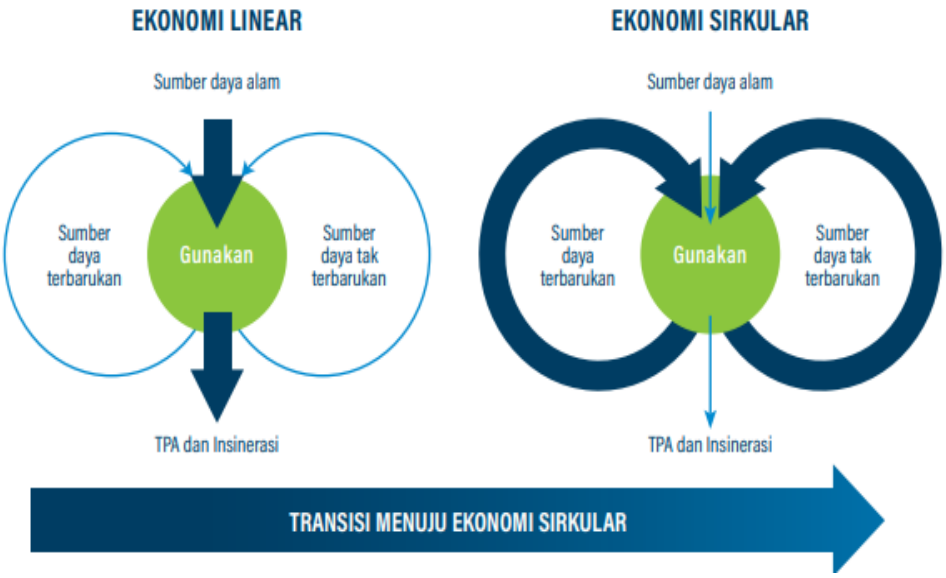

Berbeda dengan model linier, ekonomi sirkular dirancang secara regeneratif yang bertujuan untuk secara bertahap memisahkan pertumbuhan dari konsumsi sumber daya yang terbatas. Konsep ini mengakui pentingnya ekonomi yang perlu bekerja secara efektif di semua skala. Hal ini didasarkan pada tiga prinsip: perancangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material yang digunakan, dan menggenerasikan sistem alami. Kunci utama dari ekonomi sirkular adalah suatu siklus tertutup, sehingga semua proses dan produk dapat kembali dimanfaatkan.

[48] Ellen MacArthur Foundation. *Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition*. Ellen MacArthur Foundation, 2015. pp. 5-7

Ekonomi sirkular didaarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

Bagan. 2.3. Tiga Prinsip Utama Ekonomi Sirkular



Dari tiga prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari ekonomi sirkular adalah memaksimalkan dan mengefisiensikan aliran produk dan material (termasuk komponen-komponen penyusunnya).

Penerapan ekonomi sirkular dapat meningkatkan pembentukan nilai tambah produk baru dari limbah yang dimanfaatkan kembali, hal ini dapat berdampak kepada menurunnya kerusakan lingkungan dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.[49] Ekonomi sirkular menawarkan peluang untuk pertumbuhan yang lebih baik, model ekonomi ini dinilai tangguh, terdistribusi, beragam, dan inklusi.

[49] Lakshmi, V. V. Aruna Devi, D. And Jhansi Rani, K. P. 2020. *Wealth From Poultry Waste, Waste Management As Economic Industry Towards Circular Economy*, 2020. Doi: 10.1007/978-981-15- 1620-7_7

2.3.3. Model Ekonomi Sirkular.

Menurut Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi", terdapat 5 model bisnis ekonomi sirkuler beserta tantangannya. Kelima model bisnis tersebut adalah Model Bisnis Rantai Pasok /sirkuler, Model Bisnis Pemulihan dan Daur Ulang, Model Bisnis Produk Tahan Lama, Model Bisnis Sewa, dan Model Bisnis Produk Sebagai Jasa. Dalam model bisnis rantai pasok sirkuler konsumen ikut berperan menuntut barang kebutuhan yang berkualitas, durasi pakai yang lama, ramah lingkungan, *zero waste*, dengan prinsip ekoefisien dan eko efektif (dengan bahan baku yang efektif menghasilkan nilai tambah yang lebih besar), dengan teknologi, kemasan, dan energi yang ramah lingkungan.[50]

Model bisnis yang pertama adalah model bisnis pemulihan dan daur ulang, orientasi utamanya terarah pada penghematan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai bahan baku, barang modal, barang kebutuhan dalam proses produksi, termasuk energi dan air. Model ini dilatarbelakangi oleh sumber daya air yang semakin langka dan semakin meningkatnya kesadaran seriusnya ancaman terhadap Bumi dan kehidupan di dalamnya karena bencana lingkungan hidup global.

Model bisnis yang kedua adalah model bisnis ketahanan umur produk yang tahan lama. Daripada menciptakan produk yang tidak tahan lama, produsen menawarkan durasi produk yang dirancang secara ekologis sejak awal untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mengedukasi pelanggan agar

[50] Soni Keraf. *Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022. Hal. 10.

berani membayar harga yang lebih mahal untuk barang yang lebih tahan lama. Selain itu, daripada produsen merayu agar konsumen lebih sering membeli produk baru konsumen didorong untuk lebih bangga dan memperoleh citra sosial sebagai tokoh masyarakat yang peduli dan berkontribusi menyelamatkan Bumi dan kehidupan di dalamnya.

Model bisnis yang ketiga adalah model bisnis sewa atau sharing. Model bisnis ini menggantikan konsep memiliki produk tertentu secara sendiri-sendiri dengan model bisnis saling berbagi produk yang sama. Namun, dibutuhkan peran pemerintah karena model bisnis ini memenuhi visi pembangunan berkelanjutan, namun butuh tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Model bisnis produk sebagai jasa ini didasarkan pada prinsip membeli atau membayar fungsi sebuah produk atau kebutuhan daripada membeli dan memiliki suatu barang kebutuhan. Model ini berwujud barang sebagai jasa, bukan komoditas. Wujud nyatanya bisa seperti sewa, jasa keamanan, jasa perawatan gedung, dan sebagainya.

2.4. Wirausaha Sosial

2.4.1. Pengertian Wirausaha Sosial

Kewirausahaan juga didefinisikan dengan usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan hal baru yang berbeda dengan yang lain. Kewirausahaan bisa menghasilkan nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Ada tiga alasan seseorang melakukan kewirausahaan; pertama, karena ingin memperoleh laba atau keuntungan. Kedua, karena ingin bebas berkreatifitas, dan ketiga karena ingin

memperoleh kepuasan hidup sebab bisa melakukan gebrakan baru yang belum dilakukan orang lain.[51] Kewirausahaan memberi gambaran bahwa kewirausahaan merupakan proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda dari yang lain (inovatif) yang memberi manfaat dan bernilai lebih bagi orang lain. Dalam kewirausahaan ada seorang wirausaha (entrepreneur) yang memiliki ide kreatif dan inovatif untuk menjalankan usaha. Wirausaha merupakan orang yang melakukan usaha kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan sumber daya yang dimiliki untuk menemukan peluang bagi memperbaiki hidup. Seorang wirausaha selalu berfikir untuk membangun usaha dan mencari peluang baru agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam kehidupan melalui aktivitas kewirausahaan yang digeluti.

Kewirausahaan sosial adalah elemen penting dalam lingkungan pendidikan bisnis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dalam situasi epidemic.[52] Menurut Idris & Hijrah Hati (2013), kewirausahaan sosial adalah proses organisasi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif melalui strategi kewirausahaan yang melibatkan identifikasi peluang yang efektif dan evaluasi, inovasi dan kemandirian finansial. Definisi tersebut dianggap tepat untuk tujuan saat ini karena mampu menyatukan perbedaan spesifik dalam atribut organisasi seperti organisasi agama versus organisasi sekuler, dan dengan jelas membedakan kewirausahaan sosial dari organisasi non-pemerintah.[53] Sedangkan

[51] M. Anang Firmansyah dan Anita Roosmawarni. *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep*. Pasuruhan: Qiara Media, 2020. Hal. 4.

[52] Littlewood, D., & Holt, D. Social Entrepreneurship in South Africa: Exploring the Influence of Environment. *Business and Society, 57(3), 2018. Pp. 525–561. https://doi.org/10.1177/0007650315613 293*

[53] Idris, A., & Hijrah H., R. Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship, 4(3), pp. 277–301. https://doi.org/10.1080/19420676, 2013. 820778*

menurut Santos (2012) kewirausahaan sosial merupakan bidang disiplin yang terpisah, beberapa setuju untuk menganalisis fenomena ini melalui kerangka kerja yang sudah ada dalam kewirausahaan. Yang terpenting, kewirausahaan sosial adalah tentang "menciptakan industri baru, memvalidasi model bisnis baru, dan mengarahkan sumber daya ke masalah sosial yang terabaikan.[54]

Kewirausahaan yang memiliki tujuan sosial dikenal dengan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Kewirausahaan sosial merupakan istilah turunan dan perluasan konsep dari teori kewirausahaan, yang membedakan adalah tujuan yang ingin dicapai.[55] Kewirausahaan sosial bertujuan untuk pencapaian nilai sosial dan pencapaian inovasi.[56] Kewirausahaan sosial tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, namun dampak positif bagi masyarakat berupa perubahan sosial juga menjadi tolak ukurnya.[57] Perubahan sosial menjadi nilai sosial (*social value*) yang menjadi pengukur utama keberhasilan kewirausahaan sosial. Hal itu dapat terwujud dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan di masyarakat.[58]

Karakteristik kewirausahaan mengacu pada tindakan langsung dalam bentuk solusi baru (inovasi) untuk populasi sasaran, konteks atau aplikasi. Tantangan untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah

---

[54] Santos, F. M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics, 111(3), 2012. Pp.335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012- 1413-4*

[55] Richard Swedberg. *Entrepreneurship: The Social Science View*. Oxford: Oxford University Press, 2000. Hal. 22.

[56] Nur Firdaus. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 22, No. 1, 2014. Hal. 55-67*

[57] Mansur Efendi. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnall Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017. Hal. 21- 38.*

[58] Irma Paramita Sofia. Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian. *Widyakala: Jurnal Universitas Pembangunan Jaya, Vol. 2, No. 1, 2017. Hal. 2-23.*

sosial cukup besar dan mungkin memerlukan beberapa unsur dari bisnis yang sukses. Juga, solusi untuk masalah sosial seringkali memerlukan transformasi mendasar dalam sistem politik, ekonomi dan sosial.

2.4.2. Model Kewirausahaan Sosial

Modal dalam kewirausahaan sosial dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya modal sosial, modal finansial dan modal manusia. Modal sosial didefinisikan dengan sumber daya yang diperoleh dari interaksi yang terjadi antar anggota dari suatu komunitas atau masyarakat. Modal sosial memiliki karakteristik berbeda dengan modal finansial. Ini karena modal sosial dengan sendirinya bisa bertambah secara kumulatif dan tidak habis atau rusak meskipun secara terus menerus dipergunakan.[59] Modal sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan bisa mendukung individu atau kelompok yang menjadi aktor di masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Modal sosial mengandungi dua dimensi; pertama, dimensi kultural yang terkait dengan nilai, sikap dan keyakinan yang berpengaruh pada kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, dimensi struktural yang berkaitan erat dengan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga di masyarakat yang mendorong terbentuknya kegiatan bersama untuk mewujudkan manfaat dan faedah bagi masyarakat luas. Kedua dimensi dari modal sosial itu berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam

[59] Nandang Mulyana. Meilanni Budiarti, dan M. Fedriyansah. *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat.* Sumedang: Penerbit Niaga Muda, edisi ke-2, 2019. Hal. 57-58.

pembangunan inklusif yang berkelanjutan.[60] Norma sosial, kepercayaan, dan jaringan menjadi tiga unsur penting dari modal sosial.[61]

Modal sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan bisa mendukung individu atau kelompok yang menjadi aktor di masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Modal sosial mengandungi dua dimensi; pertama, dimensi kultural yang terkait dengan nilai, sikap dan keyakinan yang berpengaruh pada kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, dimensi struktural yang berkaitan erat dengan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga di masyarakat yang mendorong terbentuknya kegiatan bersama untuk mewujudkan manfaat dan faedah bagi masyarakat luas. Kedua dimensi dari modal sosial itu berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan inklusif yang berkelanjutan.[62]

2.4.3. Kewirausahaan Sosial dan Pembangunan Masyarakat

Dalam konteks organisasi ekonomi, kewirausahaan sosial beroperasi dalam ekonomi sosial dan mengacu pada salah satu hasil nyata dari kewirausahaan sosial.[63] Kewirausahaan sosial menjadi faktor penting dalam pembangunan sosial melalui model yang berkelanjutan dan kelayakan ekonomi.[64](Ebrashi, 2013).

---

[60] Rusydan Fathy. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1, 2019. Hal. 1-17*

[61] Mulyana, Budiarti, dan Fedriyansah. *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat*. Sumedang: Penerbit Niaga Muda, 2019.Hal. 59.

[62] Rusydan Fathy. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1, 2019. Hal. 1-17.*

[63] Doh, S. *Social Entrepreneurship and Regional Economic Development: The Case of Social Enterprise in South Korea.* Sustainability (Switzerland), 2020. Pp. 12(21),

[64] Ebrashi, R. E. Social Entrepreneurship Theory and Sustainable Social Impact. *Social Responsibility Journal, 9(2), 2013. Pp. 188– 209. https://doi.org/10.1108/SRJ-07- 2011-0013*

Menurut De los Ríos-Sastre & González Sánchez (2020) dalam konteks pembangunan, kewirausahaan sosial memiliki hubungan positif dengan pembangunan ekonomi daerah, modal fisik, modal manusia, modal pengetahuan, dan kewirausahaan merupakan faktor yang signifikan dan penting dalam membentuk *output* ekonomi daerah.[65] Selain pembangunan, pemberdayaan dapat menjadi konstruk mediasi yang valid untuk menjelaskan hubungan antara praktik kewirausahaan dan pencapaian tujuan sosial, karena dua alasan. Pertama, memungkinkan menangkap efektivitas upaya usaha sosial untuk memecahkan masalah penerima manfaat, kedua pemberdayaan adalah konstruksi multi-level, multidimensi dan kontekstual serta dapat dilihat pada tingkat yang berbeda-beda yaitu individu, organisasi atau komunitas.

2.5. Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi Sirkular Melalui Wirausaha Sosial

2.5.1. Keunikan Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah alternatif dari Ekonomi Linier, di mana melalui ekonomi sirkular kita menjaga sumber daya tetap digunakan selama mungkin, mengekstraksi nilai maksimum saat digunakan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan material pada tingkat akhir setiap umur layanan. Hal utama yang membedakan konsep ekonomi sirkular adalah dari pemanfaatan sumber daya, di mana dalam ekonomi sirkular sumber bahan baku produk mereka berasal

[65] Santos, F. M. A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics, 111(3) 2012. Pp. 335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012- 1413-4*

dari bahan yang didaur ulang.

Ekonomi sirkular seharusnya sudah mulai diterapkan untuk industri, baik itu industri skala kecil atau skala besar. Alasan ekonomi sirkular sudah perlu diterapkan adalah:

1. Mengurangi limbah yang ada.
2. Mendorong produktivitas sumber daya menjadi lebih baik
3. Meningkatkan kemampuan bersaing
4. Mengatasi permasalahan kelangkaan sumber daya yang akan muncul di masa mendatang
5. Mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi.

Bagan. 2.5. Model Ekonomi Sirkular

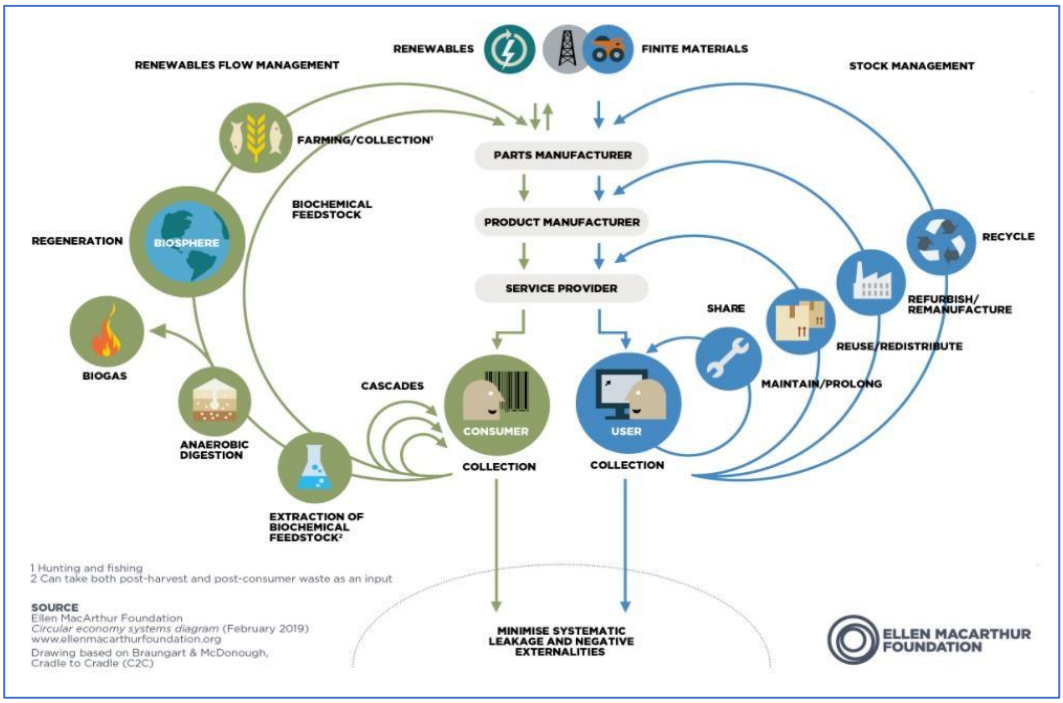

Sumber: *Mac Arthur Foundation 2019*

Ekonomi sirkular menjadi semakin penting karena meningkatkan dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan *green recovery*, baik secara global maupun di Indonesia. Ekonomi sirkular telah mendapatkan daya tarik para pemimpin dan Pemerintah Indonesia, adanya kesempatan untuk secara bertahap memisahkan pertumbuhan ekonomi dari input sumber daya yang baru, mendorong inovasi, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih kuat.

Ekonomi sirkular memiliki banyak manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi sirkular dapat berkontribusi untuk mendukung **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** (*"Sustainable Development Goal"*).

2.5.2. Lintas Sektoral

Lintas sektoral adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih Lembaga atau pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini lintas sekoral yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi sirkular tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus lintas sektoral dan komprehensif.
2. Koordinasi lintas sektoral dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing sektor dalam menjalankan komitmen penerapan ekonomi sirkular di Kota Tasikmalaya.
3. Koordinasi lintas sektoral menjadi perangkat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan secara inklusif, capaian dan dampak secara terukur.

Koordinasi lintas sektoral dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi secara

bersama-sama dan menciptakan hubungan kerja yang baik.

2.5.3. Penerapan Ekonomi Sirkular

Terdapat 5 tindakan yang mesti dilakukan dalam strategi meningkatkan ekonomi sirkular melalui potensi wirausaha sosial adalah *reduce, repair, reuse, recyle* dan *reimagine*.[66]

1. *Reduce*
    a. Menyingkirkan limbah dalam produksi dan rantai suplai (seperti percetakan 3D).
    b. Memvisualisasikan produk serta layanan (seperti buku elektronik).
    c. Mengurangi penggunaan energi (seperti meningkatkan efisiensi energi).
    d. Mendesain ulang produk dalam upaya memenuhi pengurangan sumber daya masukan (seperti baja yang sangat kuat di konstruksi).
2. *Reuse*
    a. Berbagi/menyewakan aset (seperti mobil, kamar, peralatan),
    b. Penggunaan produk-produk di tangan kedua,
    c. Meningkatkan manfaat aset dari penawaran layanan.
3. *Recycle*
    a. Bahan daur ulang.
    b. Pencernaan anaerobik dan ekstraksi biokimia dari limbah organik
4. *Refurbish*
    a. Pembuatan ulang produk dan komponen.
    b. Memperpanjang umur barang melalui perawatan produk

[66] Zaenal Abidin. *Ekonomi Sosial dan Bisnis Sosial.* http://socialinvesment.id/artikel/ekonomi-sirkular-dan-bisnis-sosial/ (diakses tnggal 10 Oktober 2023.

5. *Renew*

a. Memprioritaskan energi dan bahan terbarukan (seperti mengganti kemasan plastik dengan kemasan kertas).

Pemerintah akhir-akhir ini menggalakkan adanya kegiatan ekonomi yang harus memperhatikan AMDAL, dengan menjelaskannya pada beberapa kebijakan oleh pemerintah berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah (Kementerian Bappenas, 2022). Pengelolaan ekonomi sirkular di Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Adapun agenda tersebut antara lain, agenda prioritas satu yang isinya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan agenda prioritas enam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pada prioritas nasional enam, ekonomi sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan salah satu upaya untuk mencapai green economy dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas. Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau. Keterkaitan ini terlihat dari implementasi ekonomi sirkular yang mampu mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan dan dibuang, mengutamakan penggunaan energi terbarukan, dan mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam, produk yang dihasilkan, serta proses yang digunakan pada industri sehingga lebih ramah lingkungan (Bappenas, 2019).

Fasa (2021), menyatakan bahwa di Indonesia sendiri belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur ekonomi sirkular, tapi meskipun demikian

ada beberapa perundang-undangan multi sektor dalam bidang bisnis, perdagangan, investasi, energi, sumber daya mineral, pertanian dan perlindungan lingkungan hidup yang mana didalamnya terdapat muatan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan ekonomi sirkular serta prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recover dan Revalue*).[67]

Tabel 2.1 Matrik Perundang-Undangan Ekonomi Sirkular

No	Bidang	Judul	Materi Muatan
1.	Bisnis/Usaha	Undang−Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersifat wajib, dan terdapat sanksi bagi yang tidak mematuhinya (Pasal 1 angka 3; Pasal 66; dan Pasal 74)
		Undang−Undang Nomor 20 tahun2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha yang melestarikan lingkungan hidup (Pasal 20 huruf d; dan Pasal 25 ayat (3))
2.	Perindustrian	Undang−Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Ketentuan mengenai industri hijau yang bersifat berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 3; Pasal 3 huruf c; Pasal 75 huruf c; Pasal 77−83; Pasal 110 huruf 1; dan Pasal 117)
3.	Perdagangan	Undang−Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Ketentuan mengenai perdagangan jasa lingkungan dan kegiatan-kegiatan perdagangan yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat (2) huruf e; Pasal 35 huruf d; dan pasal 60 ayat (3) huruf a)
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Undang−Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	Ketentuan mengenai kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk turut aktif dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat (Pasal 40)
		Undang−Undang Nomor 30	Ketentuan mengenai penyediaan dan

[67] Fasa, Angga Wijaya Holman.Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia MengenaiEkonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding, 2021. Vol. 10 No. 3. Hal 339-357*

No	Bidang	Judul	Materi Muatan
		Tahun 2007 tentang Energi	pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 20−22); dan konservasi energi (Pasal 25)
		Undang−Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	ketentuan mengenai pemanfaatan sumber energi primer, dimana penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 6)
		Undang−Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggug kawab pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang
		Undang−Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang−Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggug kawab pelaku usaha untukterlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang
5.	Pertanian	Undang−Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Ketentuan mengenai perbenihan dan pembibitan yangbersifat berkelanjutan (Pasal 25−27); dan pelindungandan pemeliharaan pertanian (Pasal 48−53)
6.	Lingkungan Hidup	Undang−Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Definisi pengelolaan sampah: kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka5); hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah (Pasal 11−16); dan pengelolaan sampah rumah tanggadan sampah sejenis sampah rumah tangga (Pasal 19− 23).
		Undang−Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi mengenai pengelolaan limbah B3 (Pasal 1 angka 23), definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 33); ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungandan berkelanjutan (Pasal 12); pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup (Pasal 13 dan14); instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42− 43); dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58−61).

Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa bidang industri di Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penerapan ekonomi sirkular, yaitu makanan dan minuman (kemasan); pakaian atau tekstil/garmen; jasa konstruksi; plastik; dan elektronik, (Bappenas, 2021). terdapat kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jaktranas).

Rizos (2015) menyatakan ada beberapa hambatan dalam praktek bisnis ekonomi sirkular:

1. Budaya lingkungan.

   Manajer dalam UKM merupakan pemilik perusahaan, sehingga mereka terhadap keputusan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu mungkin mempunyai sikap positif terhadap bisnis yang ramah lingkungan, sementara yang lain mungkin berpikir sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dari budaya lingkungan yang dianut.
2. Hambatan finansial.

   Beberapa UKM terkendala sumber daya keuangan dalam mengelola skema daur ulang (Eunomia Research & Consulting, 2011).
3. Kurangnya dukungan pemerintah dan perundang-undangan yang efektif.

   Kurangnya dukungan pemerintah melalui penyediaan dana, pelatihan, kebijakan pajak dan perlunya agenda regulasi yang lebih baik dalam hal desain dan implementasi kebijakan lingkungan.
4. Kurang informasi.

   Kurangnya pengetahuan tentang manfaat ekonomi sirkular sehingga menjadi penghambat dalam penerapannya.
5. Beban administratif.

   Peralihan UKM ke praktik bisnis ramah lingkungan biasanya menimbulkan beban administratif berasal dari undang-undang lingkungan hidup.
6. Kurangnya keterampilan teknis.

Kurangnya keterampilan teknis internal merupakan faktor tambahan hambatan yang menghalangi UKM untuk memanfaatkan peluang ekonomi hijau.

7. Kurangnya dukungan dari jaringan pasokan dan permintaan.

   Kurangnya kesadaran pemasok dan pelanggan terhadap lingkungan diakui secara luas sebagai faktor penghambat dalam literatur yang ada.

2.6. Dasar Hukum Ekonomi Sirkular

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT.M/ Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limnah Domestik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di daerah tahun 2022-2024.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat: 2/134/2021);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembagunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (*mix method*). Karena pada penelitian ini, beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif (persepsi, pendapat dan pandangan manusia) dengan bantuan kuesioner dan wawancara. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis SWOT, hasil analisisnya disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau *field research*, yaitu peneliti melakukan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok

masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.[68]

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.[69] Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua variabel atau lebih.[70]

3.3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori.[71] Suharsimi

[68] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakrta: Rineka Cipta, 1998). Hal. 115

[69] Arief Furchan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992). Hal.. 21-22

[70] Prasetya Irawan. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006). Hal. 101.

[71] Jack. C. Richards. *Longman Dictionary of Language Teaching and Appied Linguistics*. (Malaysia: Longman Group, 1999). Hal. 96

Arikunto (2011) menjelaskan sumber data dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) terbagi menjadi 3 sumber data antara lain:[72]

1. Data primer.

   Menurut Sugiyono (2018). Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.[73]

2. Data Sekunder.

   Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[74]

3. Data Tersier.

   Data sebagai pelengkap yaitu data yang diambil dari kamus, artikel jurnal, website resmi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data pada kajian ini, yaitu menggunakan metode campuran (gabungan metode kuantitatif dan kualitatif). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui data sekunder dan survei kuesioner. Sedangkan untuk pengumpulan data kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi

[72] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 12

[73] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal.456

[74] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal.456

literatur, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dalam dinas terkit.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi kepustakaam (*library research*), yaitu mencari data dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian, melalui penelaahan berbagai literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dokumen, perundang-undangan negara maupun peraturan pemerintah Tasikmalaya yang berkaitan dengan begaimana meningkatkan ekonomi sirkular melalui potensi wirausaha sosial Kota Tasikmalaya.
b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Kota Tasikmalaya, dengan teknik sebagai berikut:
    1. Observasi

        Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif. Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti. Menurut Widoyoko Eko Putro (2013) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak suatu gejala pada objek penelitian.[75] Observasi bertujuan untuk mendapatkan suatu keakraban yang dekat dan mendalam

[75] Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 33

dengan suatu kelompok individu dan perilaku mereka melalui keterlibatan yang intensif dengan orang dilingkungan alamiah mereka.[76]

Teknik observasi bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa variabel penelitian yang berkenaan dengan observasi ini, yakni berkaitan dengan kebijakan pengembangan ekonomi sirkular, potensi kewirausahaan sosial dan institusi pendukung.

2. Wawancara

Lexy J. Moleong (2009) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif. Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi.[77] Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap instansi terkait Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan pelaku wirausaha sosial.

3. Kuisioner

Kuesioner menurut Suharsimi Arikunto (2002) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.[78] Kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan

[76] Djaman Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011) Hal.117.
[77] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Hal. 143
[78] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). Hal. 124

dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab dan diisi oleh responden sebagai sampel yang terpilih. Responden dalam penelitian ini yakni terkait instansi Pemerintahan Kota Tasikmalaya, akademisi dan pelaku wirausaha sosial.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu.[79]Dalam penelitian ini melihat dan mengkaji dokumen resmi yang berkaitan dengan pengembangan ekonosi sirkular dan potensi wirausaha sosial.

3.5. Narasumber Penelitian

Nara sumber dalam penelitian ini yaitu dinas terkait Pemerintahn Kota Tasikmalaya dan pelaku wirausaha sosial. Pemilihan narasumber ditentukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap permasalahan yang diteliti serta pengetahuan dan pengalamannya terhadap permasalahan. Karena tujuan penelitian adalah menggali informasi mengenai strategi dan kebijakan meningkatkan ekonomi sirkular dan potensi wirausaha sosial Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, responden ditunjuk berdasarkan keahliannya. Adapun kriteria dari responden tersebut adalah sebagai berikut:

[79] Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010). Hal.192

Tabel 3.1. Kriteria Sampel Ahli

No	Kelompok Sampel	Kriteria	Jumlah (orang)
1.	Balitbangda Kota Tasikmalaya	Masa pengabdian minimal 5 tahun, pernah terlibat dalam program pengembangan UKM, diutamakan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi sirkular dan wirausaha sosial	3
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tasikmalaya	Masa pengabdian minimal 5 tahun, pernah terlibat dalam program pengembangan UKM, diutamakan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi sirkular dan wirausaha sosial	1
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Berpengalaman minimal 5 tahun di bidang lingkungan hidup dan persampahan	2
4.	Pelaku wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya	Tinggal dan beraktivitas serta memiliki visi dan harapan dalam pengembangan serta pelaku wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.	5
Total Responden			**11**

Sumber: Data diolah peneliti

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal ekonomi sirkular dan wirausaha sosial, sehingga diketahui faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Disamping menganalisis faktor internal juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka meningkatkan ekonomi sirkular dan wirausaha sosial. Berdasarkan dari hasil analisis SWOT, diperoleh alternatif-alternatif kebijakan terpilih dan kemudian dilanjutkan analisisnya untuk menentukan pemilihan prioritas kebijakan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden terpilih untuk digunakan dalam analisis SWOT. Data sekunder diperoleh dari Bappelitbangda

Kota Tasikmalaya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tasikmalaya, hasil riset akademis, pelaku wirausaha sosial, dan instansi lain yang relevan yang digunakan sebagai data pendukung.

Dalam melakukan analisis SWOT, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal
2. Penyusunan kuesioner
3. Penentuan responden dan pengisian kuesioner
4. Analisis Data.

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi/perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis ini dapat menggambarkan secara jelas bagaiamana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi/perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis.

3.6.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Ekasternal

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisis selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan faktor-faktor internal dan eksternal, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen dan literatur terkait.

3.6.2. Penyusunan Kuisioner

Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dirumuskan, kemudian diminta masukan dari nara sumber yang diyakini menguasai permasalahan untuk melakukan pengurangan, penambahan, maupun penajaman terhadap faktor-faktor tersebut. Tahapan ini sangat penting untuk mendapatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang signifikan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yaitu pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing kawasan industri kecil. Untuk mengantisipasi adanya faktor-faktor penting lainnya yang belum termasuk, maka dalam kuesioner diberi tempat kosong diurutan bawah, sehingga responden dapat menambahkan faktor lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang ada.

3.6.3. Penentuan Responden dan Pengisian Kuisioner

Setelah kuesioner selesai disusun, kuesioner diberikan kepada responden yang dipilih berdasarkan faktor keterkaitan serta pemahaman terhadap masalah yang diteliti (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini, responden ditujukan terhadap 3 kelompok sasaran, yang terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi sirkular dan potensi wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya, diantaranya: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Dinas Perindustrian, Perdaganga dan Koperasi, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pelaku wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya.
3. Masyarakat setempat yang diwakili oleh akademisi yang memiliki perhatian kepada pengembangan ekonomi ekonomi sirkular dan wirausaha sosial. Di Kota Tasikmalaya.

Pemilihan kelompok tersebut sebagai responden adalah berdasarkan masalah yang dilakukan dalam studi, sinergis dengan kepentingan atau tugas responden baik langsung maupun tidak langsung serta asumsi bahwa responden dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dilakukan studi.

3.6.4. Analisis Data

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan persepsi ahli terhadap penilaian indikator-indikator utama, yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal pada. Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan peluang dari stakeholder. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*). Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yaitu : kekuatan dan kelemahan dengan kondisi ekternal yaitu peluang dan ancaman yang ada, kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT, untuk mendapatkan strategi terbaik (*the best strategy*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan visi, misi dan tujuan, kondisi sekarang, kondisi yang akan datang, strategi dan kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat dilakukan melalui faktor-faktor strategis analisis SWOT.

Penilaian ahli dari faktor internal-eksternal tersebut akan menghasilkan kelompok faktor-faktor: *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*. Kemudian dilakukan analisis matriks SWOT, dengan melakukan interaksi merger (penggabungan) dari kelompok faktor internal (*Strength*, *Weakness*), dengan

kelompok faktor eksternal (*Opportunity*, *Threat*) yang digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini:[80]

Tabel 3.2. Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		FAKTOR INTERNAL	
		STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO (Strength-Opportunity)	STRATEGI ST (Strength-Threat)
	THREATS (T)	STRATEGI WO (Weakness-Opportunity)	STRATEGI WT (Weakness-Threat)

Sumber: Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Hasil kombinasi interaksi strategi : SO, WO, ST dan WT seperti diuraikan diatas menunjukkan sebanyak 4 strategi pilihan yang dapat ditempuh dalam melihat persepsi responden, terhadap berbagai kemungkinan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dapat dilakukan. Hasil interaksi antara strategi internal dan strategi eksternal dapat menunjukkan strategi dominan terbaik untuk solusi yang dipilih sebagai strategi andalan. Dalam analisis matriks SWOT terjadi interaksi penggabungan dari strategi yang meliputi kombinasi interaksi strategi internal-

[80] Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hal. 31

eksternal yang terdiri dari:[81]

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*), ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi ST (*Strength-Threat*), ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*), ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menciptakan peluang.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*), ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Sebelum membuat matrik interaksi faktor strategi eksternal dan internal (EFAS-IFAS). Tentukan terlebih dahulu faktor strategi eksternal dan internal dengan cara sebagai berikut:

a. External Strategy Factor Analysis (EFAS)

EFAS matrik digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, teknologi dan informasi tentang persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada. Tahap dalam mengembangkan EFAS matrik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan faktor strategis lingkungan eksternal yang mencakup perihal: peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).
2. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan faktor

[81] Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hal. 31

terhadap keberhasilan industri/perusahaan. Memperkirakan bobot dapat ditentukan dengan konsensus kelompok atau pendapat para ahli di bidang tersebut, atau yang lain. Total seluruh bobot dari faktor strategis harus sama dengan satu.

3. Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor kondisi perusahaan yang bersangkutan.

   Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya.

   Misalnya, jika nilai ancaman sangat besar ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya adalah sedikit ratingnya 4.

4. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).

5. Jumlahkan nilai pembobotan pada kolom untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktorfaktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan utnuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

b. Internal Strategy Factor Analysis (IFAS)

Langkah penyimpulan dalam mengelola lingkungan internal dapat dipakai dalam menyusun IFAS matrik. Alat perumusan strategi ini menyimpulkan dan mengevaluasikan kekuatan dan kelemahan yang besar

dalam daerah fungsional perusahaan dan juga memberikan suatu basis bagi pengidentifikasian dan pengevaluasian hubungan di antara daerah-daerah tersebut. *Intuitive judgement* sangat diperlukan dalam penggunaan IFAS matrik ini. Tahap pengembangan IFAS matrik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan faktor strategis lingkungan internal yang mencakup perihal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).
2. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) dampai 1.0 (sangat penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1.0).
3. Memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dnegan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan di bawah rata-rata industri nilainya 4.
4. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).
5. Jumlahkan nilai pembobotan pada kolom untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total menunjukkan

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktorfaktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan utnuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

Untuk mengetahui posisi relatif kawasan dibandingkan dengan kawasan lain yang juga menjual produk keripik di Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan analisis dengan menggunakan CP Matrik (*Competitive Profile Matrix*). Bobot, rating dan nilai baik pada CP Matrik maupun pada IFAS-EFAS matrik memiliki tujuan yang sama. Perbedaannya, faktor strategis pada CP Matriks lebih luas, tidak mencakup data yang spesifik dan actual, bahkan berfokus pada pengeluaran internal yang berbeda pada IFAS matrik. Faktor strategis dalam CP Matrik juga tidak dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan seperti dalam IFAS matrik. Rating dan nilai bagi kawasan lain dapat dibandingkan dengan kawasan yang diteliti.[82] Nilai 1 pada rating diberikan jika kondisi kawasan yang diteliti lemah dibandingkan kawasan lain, 2 = sedikit lemah, 3 = sedikit lebih kuat, 4 = paling kuat.[83]

3.7. Rencana Kerja

Penyusunan Kajian Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya yaitu, menganalisis kondisi wirausaha sosial yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan menghitung potensi serta efek ekonomi sirkular yang diakibatkan oleh

[82] Fred. R. David. *Strategic Management Concepts.* (New Jersey: Prentice Hall, 2001). Hal. 115.
[83] Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). Hal. 31

wirausaha sosial.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Penyedia Tim Pelaksana dibantu Tim Tenaga Ahli melaksanakan pengumpulan bahan/ data awal.

    a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data/ informasi;

    b. Melakukan penelahaan terhadap keadaan dilapangan mengenai potensi ekonomi sirkular yang diakibatkan potensi wirausaha sosial.

    c. Merumuskan instrument data yang dibutuhkan dalam kajian.

    d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data awal

        - Jumlah, jenis, dan sebarannya serta omset dari wirausaha sosial
        - Jenis jumlah dan omset ekonomi sirkular akibat wirausaha sosial.

    2. Keluaran (*output*) dari tahapan ini adalah Laporan Awal Kajian Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya.

    3. Sistematika Laporan Awal minimal berisi Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika), Kajian Literatur, dan Metodologi (Lokasi dan Jenis Penelitian, Rancangan Instrumen/Variabel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa, Tahapan Penelitian).

1. Tahap Pembahasan Laporan Awal :

a. Laporan Awal, tim tenaga ahli, dibahas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait dengan penyusunan Kajian Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan adalah memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan kajian.

b. Masukan, koreksi dan kritik perbaikan dari hasil pembahasan, harus dipilah, dipilih dan dipertimbangkan secara matang oleh Tim tenaga ahli dan Tim Pelaksana dalam rangka perbaikan atas kajian yang dibuatnya.

c. Keluaran (*output*) setelah Tahap Pembahasan Laporan Awal adalah penyempurnaan Laporan Awal.

2. Tahap Pengumpulan Bahan / Data, Kompilasi dan Analisa:

a. Tim Pelaksana dan Tim Tenaga Ahli melaksanakan pengumpulan bahan/ data baik berupa jenis, prosedur dan bentuk inovasi yang telah dilakukan maupun bahan/data lainnya yang diperlukan, sekaligus melakukan kompilasi dan analisa atas bahan/data tersebut.

b. Keluaran (*output*) dari tahapan ini adalah Laporan Antara Kajian Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi Sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya.

c. Sistematika Laporan Antara minimal berisi Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika), Kajian

Literatur, dan Metodologi (Lokasi dan Jenis Penelitian, Rancangan Instrumen/Variabel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa, Tahapan Penelitian), Analisa dan Pembahasan.

3. Tahap Pembahasan Laporan Antara.

   a. Laporan Antara kajian, hasil kerja tim tenaga ahli dan Tim Pelaksana, dibahas dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan adalah memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan dokumen Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi Sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya.

   b. Masukan, koreksi dan kritik perbaikan dari hasil pembahasan, harus dipilah, dipilih dan dipertimbangkan secara matang oleh Tim tenaga ahli dan Tim Pelaksana dalam rangka perbaikan atas kajian yang dibuatnya.

   c. Keluaran (*output*) setelah Tahap Pembahasan Laporan Antara adalah penyempurnaan Laporan Antara.

4. Tahap Laporan Akhir.

   a. Bila dalam Laporan Antara terdapat kelemahan data atau analisa maka Tim Tenaga Ahli wajib memperbaikinya dan menyempurnakan dokumen tersebut sehingga bisa dijadikan Laporan Akhir. Bila diperlukan maka dimungkinkan melakukan pengumpulan data/analisa baru.

b. Sistematika Laporan Akhir keseluruhan sistematika yang telah ditentukan.

c. Laporan Akhir kajian, yang disusun oleh team tenaga ahli, dibahas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait. Tugas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yakni memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan kajian.

d. Dalam pembahasan kali ini, team penyusun dan tim tenaga ahli berkewajiban mempertahankan alasan, argumen dan dasar pemikiran penyusunan Laporan Akhir. Apabila dalam pembahasan disepakati adanya perbaikan, maka team penyusun dan tim tenaga ahli wajib memperbaiki Laporan Akhir kajian tersebut.

e. Keluaran (*output*) Tahap Pembahasan Laporan Akhir adalah Laporan Akhir yang telah disempurnakan.

5. Hasil Kajian.

a. Tersedianya dokumen Strategi dan Kebijakan Meningkatkan Ekonomi Sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial Kota Tasikmalaya.

b. Peta Pesebaran Wirausaha Sosial di Kota Tasikmalaya.

BAB IV
POTENSI EKONOMI SIRKULAR DAN WIRAUSAHA SOSIAL

4.1. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya.

4.1.1. Sejarah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibukota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai di gulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976 - 1981. Pada saat itu melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Wali Kota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa barat, H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata (1996 - 2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan

Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Wali Kota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desan menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena

itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Tamansari.

4.1.2. Keadaan Geografis Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108 08’83” – 108 24’02” Bujur Timur dan 7 10’ – 7 26’32” Lintang Selatan di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota provinsi Jawa Barat yaitu ± 105 Km dan dari ibukota negara ± 225 Km.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Taskmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011–2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km2). Hal ini berarti ada selisih luas 1.229,07 Ha (12,29 Km2) sebagai implikasi penggunaan metodologi pengukuran yang berbeda.

Gambar 4.1. Peta Kota Tasikmalaya

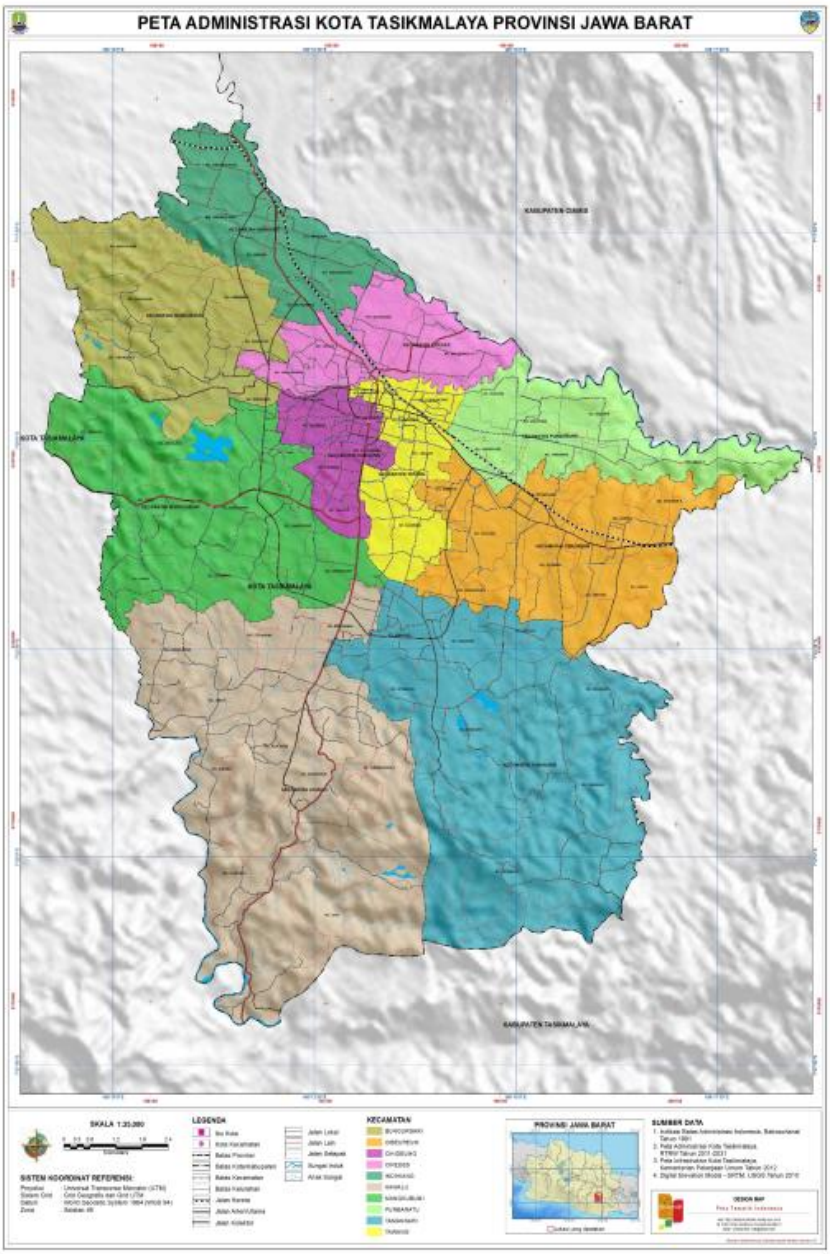

Sumber: BPS, 2023

Gambar 4.2. Geografi dan Iklim

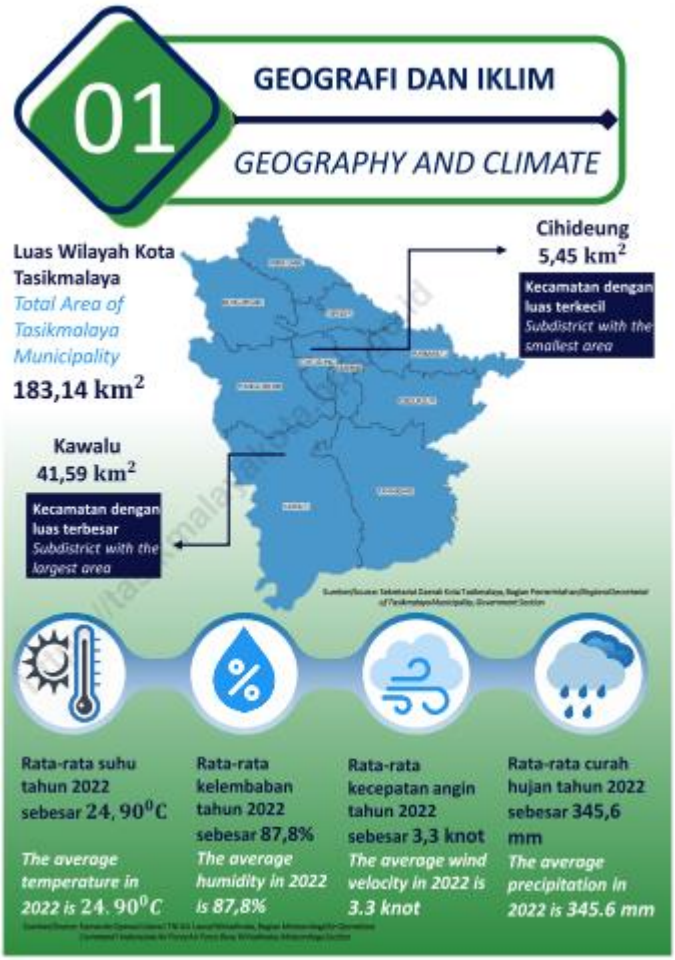

Sumber: BPS, 2023

Batas-batas wilayah Kota Tasikmalaya adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
2. Sebelah Timur: Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan);

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.

Secara Topografi, Kota Tasikmalaya berdasar bentang alamnya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Gambar 4.3. Luas Daerah menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya (%)

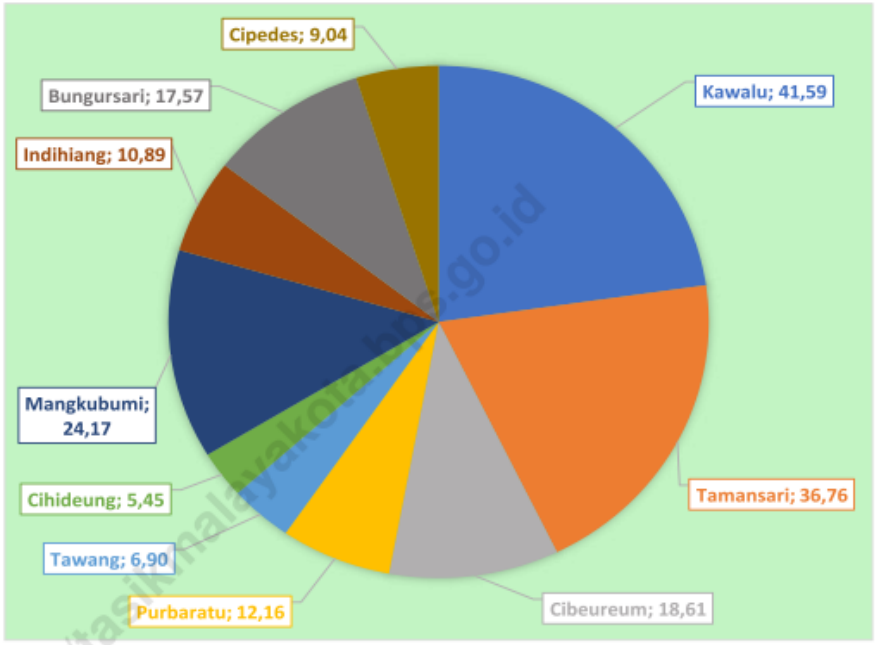

Sumber/*Source:* Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Bagian Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Batas Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya/*Regional Secretariat of Tasikmalaya Municipality, Government Section. Based on the Mayor of Tasikmalaya Regulation number 29 of 2021 concerning Village Boundary Maps in Tasikmalaya Municipality*

Sumber: BPS, 2023

4.1.3. Keadaan Demografis dan Sosial Budaya Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri, khususnya di era sebelum 1980-an karena hampir di seluruh di wilayah tersebar pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok besar maupun kecil, bahkan melahirkan tokoh perjuangan nasional di antaranya adalah Zainal Mustafa.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 719.882 jiwa. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di priangan timur dan selatan berada di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Bidang-bidang yang sangat potensial di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat industri. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai macam potensi, salah satunya yaitu potensi industri bordir yang sudah mendunia. Saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat sentra kerajinan bordir untuk para pengrajin Tasik, yang berlokasi di Kawalu.

Gambar 4.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan



Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan proyeksi interim hasil Sensus Penduduk BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 733.467 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,32 persen dibanding penduduk tahun 2021. Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.521 jiwa/km^2 dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.166 jiwa/km^2. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.005 jiwa/km^2. Jumlah angkatan kerja Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 347.063 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,62 persen

Sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebanyak 4.652 orang dengan jumlah yang ditempatkan sebanyak 1.250 orang.

4.2. Dasar Hukum Kegiatan Kajian Persampahan.

1. Undag-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undag-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut (Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.
16. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
17. Surat Edaran No. 660/Ed.022-DLH/2022 tentang Pembentukan Bank Sampah.

4.3. Penerapan Ekonomi Sirkular.

4.3.1. Keunikan Ekonomi Sirkular.

Ekonomi sirkular adalah alternatif dari Ekonomi Linier, di mana melalui ekonomi sirkular kita menjaga sumber daya tetap digunakan selama mungkin, mengekstraksi nilai maksimum saat digunakan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan material pada tingkat akhir setiap umur layanan. Hal utama yang membedakan konsep ekonomi sirkular adalah dari pemanfaatan sumber daya, di mana dalam ekonomi sirkular sumber bahan baku produk mereka berasal dari bahan yang didaur ulang. Melalui pemanfaatan daur ulang ini maka sampah, emisi, dan energi yang terbuang dapat diminimalisasi.

Ekonomi sirkular seharusnya sudah mulai diterapkan untuk industri, baik itu industri skala kecil atau skala besar. Alasan ekonomi sirkular sudah perlu diterapkan adalah:

1. Mengurangi limbah yang ada.
2. Mendorong produktivitas sumber daya menjadi lebih baik.
3. Meningkatkan kemampuan bersaing.
4. Mengatasi permasalahan kelangkaan sumber daya yang akan muncul di masa mendatang.
5. Mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi. Ekonomi sirkular memiliki banyak manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena memiliki tiga prinsip: merancang limbah dan polusi untuk mengurangi limbah dan polusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca; menjaga produk dan bahan tetap digunakan; dan regenerasi sistem alami untuk penyerapan karbon tahan. Selain itu, ekonomi sirkular dapat berkontribusi untuk

mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *("Sustainable Development Goals").*

4.3.2. Lintas Sektoral.

Lintas sektoral adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih lembaga atau pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini lintas sekoral yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi sirkular tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus lintas sektoral dan komprehensif.
2. Koordinasi lintas sektoral dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing sektor dalam menjalankan komitmen penerapan ekonomi sirkular di Kabupaten Tangerang.
3. Koordinasi lintas sektoral menjadi perangkat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan secara inklusif, capaian dan dampak secara terukur.
4. Koordinasi lintas sektoral dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi secara bersama-sama dan menciptakan hubungan kerja yang baik.

4.3.3. Penerapan Ekonomi Sirkular.

Ekonomi sirkular di Indonesia sudah mulai diterapkan di beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pengelolaan sampah. Dalam kegiatan pengelolaan sampah hal yang biasanya dilakukan untuk menerapkan ekonomi sirkular adalah sistem 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Repair*). Sampah tersebut diproduksi ulang sehingga mengurangi dampak limbah buangan yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat digunakan kembali sebagai produk baru atau bahan baku

produk lain. Salah satu implementasinya adalah program Bank Sampah yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat.

Program Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini menampung, memilah, dan menyalurkan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi pada pasar, sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Pada program bank sampah masyarakat dapat berperan sebagai produsen dan konsumen dengan memproses dan mempergunakan sampah rumah tangganya masing-masing.

Hasil pemilahan tersebut dapat dijual kepada pihak ke tiga atau digunakan untuk keperluan sehari-hari. Penerapan ekonomi sirkular dimulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang diambil dari beberapa pasar akan diolah menjadi pupuk organik oleh masyarakat. Pupuk organik yang telah jadi akan dijadikan pupuk untuk perkebunan organik yang akan dilakukan oleh masyarakat juga. Selain pengelolaan sampah, pertanian organik dan Industri berkelanjutan juga telah mulai diimplementasikan. Karena ekonomi sirkular bukan saja menyangkut pengelolaan sampah, tetapi dapat mencakup banyak aspek. Namun sayangnya pemahaman sebagian orang mengenai ekonomi sirkular masih berfokus pada persampahan saja. Oleh karena itu perlu pemahaman lebih mendalam mengenai ekonomi sirkular supaya lebih banyak memberikan manfaat dan dapat dioptimalisasi.

1. Pengelolaan Sampah.

Sampah adalah padatan yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Sampah dapat berasal dari kegiatan kita sehari-hari atau berasal dari industri, tempat-tempat komersial, pasar, kebun, dan lain sebagainya. Biasanya sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bagian hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal yang berasal dari bahan mineral seperti logam, kaca, plastik, dan lain-lain. Sampah organik mengandung berbagai macam zat seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dsb. Secara alami, zat-zat tersebut mudah terdekomposisi oleh pengaruh fisik, kimia, enzim yang dikandung oleh sampah itu sendiri dan enzim yang dikeluarkan oleh organisme yang hidup di dalam sampah.

Pengelolaan sampah diperlukan karena dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah untuk menangani sampah dalam jumlah yang cukup banyak. Salah satu dampak buruk yang terjadi akibat penumpukan sampah adalah munculnya penyakit yang membahayakan manusia, mencemari lingkungan, dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia umumnya belum dilaksanakan secara terpadu. Sampah dari beberapa sumber langsung diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan atau pengolahan terlebih dahulu. Dari TPS sampah kemudian hanya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk ditimbun. Upaya pertama dalam pengelolaan sampah terpadu adalah pemilahan yang dilakukan dari sumber

penghasil sampah. Sampah organik (sisa makanan, daun, dan lain-lain) dan sampah anorganik (logam, kaca, plastik, dan lain-lain) dipisahkan dan diberikan tempat yang terpisah. Sampah organik yang telah dipilah bisa dibuat menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang masih mempunyai nilai jual dapat dijual kembali.

2. Pertanian Organik.

Pertanian organik merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Pertanian organik tidak bisa dipisahkan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pertanian organik juga menerapkan pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat, dan menghemat energi.

Persyaratan untuk pangan yang diproduksi secara organik berbeda dengan produk pertanian lainnya, di mana prosedur produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identifikasi dan pelabelan, serta pengakuan dari produk organik tersebut. Sistem pertanian organik dirancang untuk:

a. Mengembangkan keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam system.
b. Meningkatkan aktivitas biologi tanah.
c. Menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang.
d. Mendaur-ulang limbah asal tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
e. Mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal.

f. Meningkatkan penggunaan tanah, air dan udara secara baik, serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.

g. Menangani produk pertanian dengan penekanan pada cara pengolahan yang baik pada seluruh tahapan untuk menjaga integritas organik dan mutu produk.

h. Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila produksi pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup bagi petani. Tetapi sering motivasi ekonomi menjadi kemudi yang menyetir arah pengembangan pertanian organik. Kesadaran bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, pertanian organik masih merupakan hal yang baru dan baru mulai popular beberapa tahun lalu.

Pertanian organik sangat perlu dikembangkan di Kota Tasikmalaya supaya hasil olahan pupuk organik yang dihasilkan dari sampah organik bisa dimanfaatkan dengan baik, juga bisa melaksanakan dan mengembangkan ekonomi sirkular berbasis pertanian.

3. Industri Berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi.
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi.

Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dalam dekade terakhir, maka arah perkembangan pembangunan kawasan industri juga menitik beratkan pada pembangunan Kawasan Industri Hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di dalam kawasan industri tersebut mulai diperkenalkan energi terbarukan, pemakaian energi yang efesien, dan sistem pengolahan sampah terpadu.

4. Implementasi Daerah.

Berdasarkan FGD *(Focus Group Discussion)* yang melibatkan Dinas lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Pedagangan dan UMKM, Kecamatan dan pelaku wirausaha sosial diperoleh data, beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pembentukan bank sampah Kota Tasikmalaya
2. Program kurangi sampah di sekolah.
3. Program kurangi sampah di kantor.
4. Budidaya maggot. Maggot ini dimanfaatkan untuk pakan ternak saat ini.
5. Pengolahan sampah TPA berbasis ramah lingkungan.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis (BimTek), dan pelatihan tentang pengelolaan persampahan.
7. Pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan *sterofoam*.

4.4. Pengembangan Potensi Kewirausahaan Sosial.

4.4.1. Dasar Hukum.

1. Inkubator Bisnis. Menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan iptek. (UU No. 20 tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP 41/2011, PERPRES No. 27 Tahun 2013).

2. Pengembangan SDM Wirausaha:
   a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
   b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
   c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. (UU 20 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1998, PP No. 44 Tahun 1997, PERPRES No. 27 Tahun 2013, Inpres No. 10 Tahun 1999, Keppres No. 127 Tahun 2001).

3. Lembaga Pendukung. Lembaga Pembiayaan (kemudahan akses dengan penyediaan pendanaan, keringanan jaminan tambahan dsb) dan Lembaga Penjaminan (perluasan penjaminan lembaga yg sudah ada atau pembentukan lembaga baru). (UU 20 tahun 2008, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 32 Tahun 1998).

4. Pendidikan Kewirausahaan Pendidikan kewirausahaan kepada pemuda berupa pelatihan, Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan. (PP 41/2011,

SKB Menkop Dan Mendiknas Nomor 02/SKB/MENEG/VI/2000 Dan Nomor 4/U/SKB/2000 Tahun 2000).

5. Gerakan Kewirausahaan Nasional program kelembagaan kewirausahaan, program pemasyarakatan kewirausahaan, dan program pembudayaan kewirausahaan di Instansi pemerintah. (Intruksi Presiden No. 4 Tahun 1995, peraturan terbaru 2008).
6. Pendirian LPKP (Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda) LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. (Pasal 27 UU 40/2009, PP 60 Tahun 2013).
7. LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir) Bentuk berupa BLU (Badan Layanan Umum), mengelola dana sebesar 2,65 T (2014) yang diperuntukkan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro. (PP No. 23 Tahun 2005).
8. Pola-Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Menengah-Kecil Mengatur pola kemitraan antara Usaha Besar dengan Menengah dan kecil, semisal model Inti-Plasma dsb. (PP No. 44 Tahun 1997, PP 41/2011, Keppres No. 127 Tahun 2001, Inpres No. 10 Tahun 1999, Permenneg BUMN Per05/MBU/2007).
9. Perlindungan terhadap Sektor Usaha Tertentu Beberapa sektor usaha tertentu diproteksi agar usaha kecil dan mikro tetap dapat hidup. (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Keppres No. 127 Tahun 2001).
10. Insentif Pajak dan Fasilitas Lainnya bagi Penanam Modal. (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggandeng UMKM, Fasilitas diberikan kepada penanam modal yang (salah satunya) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Fasilitas berupa pengurangan pajak

penghasilan, pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan penangguhan pajak impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan.

4.4.2. Pembangunan Ekonomi Sirkular Melalui Kewirausahaan Sosial.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi, maka stategi umum pembangunan kewirausahaan di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya perlu diperkuat dengan pendekatan manajemen komunal berbasis negara dan masyarakat. Dalam hal ini, negara harus membentuk kerangka dasar masyarakat ekonomi yang memungkinkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan nasional. Sebagai bagian dari potensi ekonomi nasional, pengelolaan kewirausahaan dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen komunal yang melibatkan peran negara serta masyarakat secara integratif. Pola integratif ini dapat dikembangkan melalui pembangunan ekonomi dan menejemen sumber daya berbasis masyarakat (*community based economic development and resource management*). Fokus utama dalam program pembangunan ini adalah pemberdayaan masyarakat sebagai entitas sosial untuk mengusahakan sistem kerja yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi. Salah satu manifestasi utama dari pemberdayaan ialah bahwa rakyat diberi kesempatan untuk untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang menyangkut nasibnya.

Gambar 4.5. Model Ekonomi Sirkular

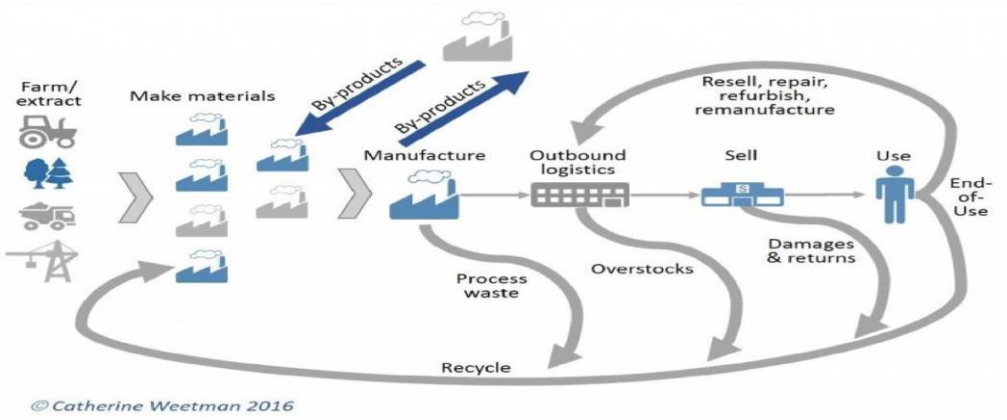

Sumber: Model Ekonomi Sirkular *Sumber: Catherine Weetman 2016*

Pengelolaan kewirausahaan secara professional dan tangguh dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat asalkan pembagian manfaat dari proses tersebut dialokasikan terhadap investasi sosial. Peluang komersial dari pengelolaan kewirausahaan harus sejalan dengan pembangunan manusia, baik secara sosial, maupun ekonomi. Pengelolaan tersebut harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konotasi pembangunan yang destruktif, pengelolaan kewirausahaan harus mampu menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dan efek jangka panjang dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan kewirausahaan dilakukan sejalan dengan prinsip pembangunan sosial dan karakter manusia Indonesia yang berwatak sosial.

Salah satu program yang sedang digalakan dengan melibatkan lintas sekotral adalah pengembangan ekonomi sirkular melalui pengembangan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial dinilai sebagai solusi dalam upaya

mempercepat penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tak lain karena kewirausahaan sosial menawarkan kelebihan manfaat dari sekedar menciptakan lapangan kerja. Kewirausahaan sosial memiliki kebermanfaatan yang luas karena wirausahawan bukan hanya berhadapan kepada karyawan yang menjadi mitra kerja tetapi juga masyarakat luas. Pola yang terjadi dalam kewirausahaan sosial adalah antara pemerintah-pengusaha-masyarakat. Ketiganya bersinergi dalam membentuk simbiosis mutualisme. Dampaknya adalah kesejahteraan, keadilan sosial dan pemerataan pendapatan.

Kewirausahaan sosial menitikberatkan keterlibatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu secara finansial maupun keterampilan untuk secara bersama-sama menggerakkan usahanya agar menghasilkan keuntungan, dan kemudian hasil usaha atau keuntungannya dikembalikan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Melalui metode tersebut, kewirausahaan sosial bukan hanya mampu menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Kewirausahaan sosial merupakan sebuah usaha yang dikerjakan per individu, rumah tangga, atau sekelompok orang dalam lingkup usaha kecil. Kewirausahaan sosial memiliki potensi dan peluang yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan sosial sendiri juga merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mengentas kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang setiap tahun semakin naik. Sebuah keberhasilan kewirausahaan sosial dilatarbelakangi oleh adanya beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah modal, sumber daya manusia, peralatan dan mesin, ketersediaan bahan baku,

pengelolaan usaha, dan informasi agar bisa diakses global. Dalam mengelola kewirausahaan sosial dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi, serta rasa percaya diri dan pantang menyerah.

Berbagai permasalahan seringkali menyertai kewirausahaan sosial, seperti yang terangkum di bawah ini:

1. Permasalahan mendasar yang bersifat klasik, yaitu berupa permasalahan akses pemasaran, pengembangan produk, permasalahan modal, dan bentuk badan hukum yang umumnya non formal.
2. Permasalahan lanjutan, yaitu antara lain dapat berupa kegiatan ekspor yang masih belum maksimal, kurangnya pemahaman dan pelatihan terkait desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, prosedur kontrak penjualan, serta segala permasalahan hukum yang menyangkut hak paten.
3. Permasalahan antara, yaitu berupa dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Strategi kewirausahaan sosial dalam mengelola pengetahuan terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menciptakan pengetahuan baru dengan mengonversikan serta mengkombinasi pengetahuan dan kepakaraan dari anggotanya agar dapat terus berinovasi.
2. Organisasi menginterpretasikan informasi tentang lingkungan untuk mendapatkan arti tentang apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan tersebut.
3. Menganalisis dan memproses informasi untuk memilih dan *commit* melakukan kegiatan sesuai dengan tindakan. Pengetahuan organisasi disini sangat penting

dan efektif karena secara terus menerus mengikuti perubahan lingkungan, menyegarkan asset serta kegiatan pemrosesan informasi untuk pengambilan keputusan.

Sampah yang menjadi prioritas dan menjadi perhatian. Salah satu kegiatan yang dapat diterapkan dalam meminimalisir permasalahan yang disebabkan sampah yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduse, Reuse* dan *Recycle*) atau mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Selain mempunyai manfaat dalam menurunkan volume timbunan sampah, pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R juga berpotensi menghasilkan insentif ekonomi kepada para pelaku yang terlibat.

Dalam rangka pengembangan kewiraushaan sosial, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* pengembangan kewirausahaan soaial antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ataupun perusahaan *start up* yang fokus mendaur ulang sampah plastic menjadi barang bernilai jual tinggi. Pengembangan usaha ini dalat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.4.3. Data Pendukung

1. Data Sampah.

Kota Tasikmalaya menghasilkan 323,156 Ton/hari. Dengan jumlah penduduk sebesar 734, 446 jiwa.

Tabel. 4.1. Prosentase Sampah Kota Tasikmalaya

No.	Jenis Sampah	Persentase
1.	Sisa Makanan	48,75%
2.	Kain	1,90%

No.	Jenis Sampah	Persentase
3.	Kaca	6,31%
4.	Logam	0,20%
5.	Kertas	5,87%
6.	Plastik	5,40%
7.	Lain-Lain	37,63%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Kota Tasikmalaya memiliki tujuh (7) jenis klasifikasi sampah, yaitu: sisa makanan, kain, kaca, logam, kertas, plastik, dan lain-lain. Dari ketujuh jenis klasifikasi sampah tersebut, sampah organik menjadi sampah yang paling dominan yaitu sebesar 48.75%. Jumlah 323,156 ton sampah/hari yang dihasilkan, hal ini merupakan jumlah yang sangat besar dan dapat mengganggu ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya tatanan hukum dan koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Selain adanya peran pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan sampah, perlu adanya implementasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Hal tersebut tentu saja memerlukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat untuk bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan pengadaan daya dukung sarana prasarana pengangkutan sampah dan pengadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Data mengenai daya dukung sarana prasarana pengangkutan sampah dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 4.2. Sarana Pengangkutan Sampah

No.	Jenis	Jumlah
1	Dump Truk	30
2	Arm Roll	12

No.	Jenis	Jumlah
3	Truck Engkel	2
4	Pick Up	2
5	Motor Roda 3	26
6	Kontainer Amroll	60
	Jumlah	**169**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel. Sarana Alat Berat

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Buldozer	2	1 Rusak Berat tidak beroperasi
2	Eksavator	3	1 Rusak Berat tidak beroperasi
	Jumlah	**5**	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Daya dukung sarana dan prasarana sampah tidak hanya berupa truk pengangkut sampah, namun juga perlu adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di wilayah tertentu. Kota Tasikmalaya memiliki TPA sampah, yaitu berada di Desa Ciangir Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seluas 11 Ha dan telah digunakan sekitar 9 Ha, sisanya tinggal 25%. Berdasarkan kajian perhitungan timbunan Kota Tasikmalaya bahwa satu keluarga menghasilkan sampah sebesar 4,44 kg per orang per hari. Data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 734,446 jiwa, artinya Kota Tasikmalaya menghasilkan 323,156 kg perhari, dan itu akan menjadi timbunan sampah di TPA Ciangir.

Tabel. 4.4. Timbunan Sampah Kota Tasikmalaya

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	291,95 ton
2	2020	292,30 ton
3	2021	315,11 ton
4	2022	319,11 ton
5	2023	323,19 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel. 4.5. Jumlah Sampah Masuk TPA Ciangir

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	32,056 ton/hari
2	2020	65,079 ton/hari
3	2021	70,413 ton/hari
4	2022	73,300 ton/hari
5	2023	179,050 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.6. TPA Ciangir



Melihat data yang disajikan masih bank sampah yang tertimbun dan belum bisa diatasi dengan baik, oleh sebab itu maka diperlukan memperbanyak bank sampah dan terus menerus melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk selalu menggunakan fasilitas bank sampah yang susah berdiri di lingkungan masing-masing. Beberapa program yang harus segera dilakukan oleh

pemerintah Kota Tasikmalaya diantaranya adalah program pembentukan bank sampah di kelurahan, kecamatan, program optimalisasi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R), program revitaslisasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Ciangir dan program pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan pelatihan tentang pengelolaan persampahan.

4.5. Model Ekonomi Sirkular Berbasis Kewirausahaa Sosial.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang memanfaatkan perputaran sumber daya yang berkelanjutan sebagai intinya yang akan mendukung aktivitas sosio-ekonomik. Ekonomi sirkular merupakan salah satu upaya untuk mengurangi limbah dan memperbaiki lingkungan.

Berikut ini model dalam pengembangn ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial.

Gambar. 4.7. Model Ekonomi Sirkular Kota Tasikmalaya

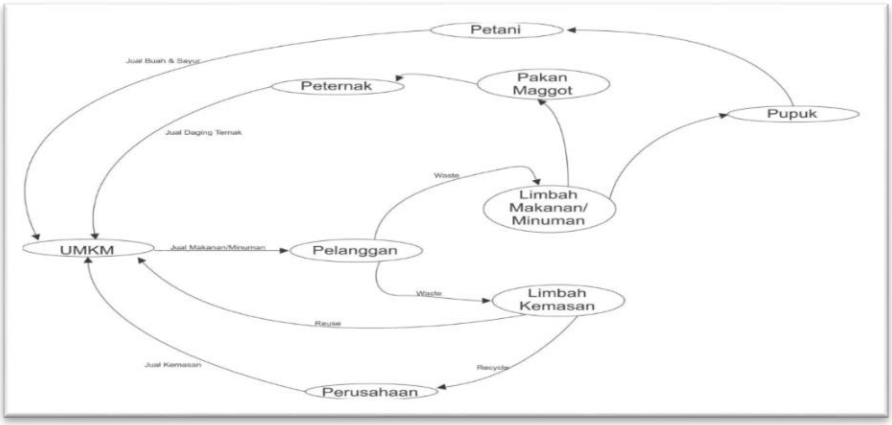

4.5.1. Pengembangan Magot

Beberapa tempat di Kota Tasikmalaya juga memiliki pembudidaya maggot

Black Soldier Fly (BSF). BSF adalah jenis lalat khusus yang dapat memproduksi telur yang nantinya telur ini akan menetas menjadi maggot (ulat besar). Maggot ini lah yang akan mengolah sampah organik sebagai pakan maggot tersebut. Saat ini di Kota Tasikmalaya telah memanfaatkan maggot BSF menjadi pakan ternak (seperti ayam, ikan, dan lainnya). Maggot ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (sekitar 40%) yang dapat menggantikan pakan ternak konvensional.

Gambar. 4.8. BSF (*Black Soldier Fly*)



Sehingga dengan menggunakan maggot BSF, Kota Tasikmalaya telah berhasil membuktikan pengolahan dengan model ekonomi sirkular. Nantinya ternak yang diberi pakan maggot BSF tersebut setelah diolah menjadi makanan,

sebagian akan menjadi sisa makanan yang merupakan sampah organik. Sampah organik ini akan diberikan kepada maggot BSF kembali sebagai suatu siklus tertutup. Ini lah yang disebut suatu model ekonomi sirkular.

Gambar. 4.9. Rumah BSF (*Black Soldier Fly*)



Photo BSF Bank Sampah



Photo BSF Rumahan

Berikut ini peternak magot dan produksi magot di Kota Tasikmalaya:

Tabel. 4.6. Peternak dan Poduksi Magot

NO	NAMA	ALAMAT	PRODUKSI	PEMASARAN
1	Masyarakat Ciherang	Ciherang-Cibeureum-Kota Tasikmalaya	700 Kwintal	PT. Biomagg
2	Goso Magot	Parakanyasag-Indihiang-Kota Tasikmalaya	1,7 Ton	PT. Biomagg
3	Uus Magot	Purbaratu-Kota Tasikmalaya	1,6 Ton	Dibuat Pasta untuk pakan ternak
4	Erik Magot	Kawalu-Kota Tasikmalaya	1,5 Ton	Pengrajin makanan lele di Bandung dan Majalengka

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Lapangan

Untuk daerah lain masih belum nampak berkembang peternak magot, dan ada juga yang tidak melanjutkan peternakan magot dikarenakan berbagai macam

kendala yang dihadapinya.

Gambar. 4.10. Magot



Photo: Magot Basar



Photo: Magot Hasil Oven

Analisis ekonomi untuk produksi magot dapat dihitung sebagai berikut:

Harga magot basah = Rp. 6.000,- x 1 Kg

= Rp. 6.000,-

Prediksi = Rp. 6.000,- x 1 Ton

= Rp. 6.000.000,-/Bulan

Harga Magot Kering/Pelet = Rp. 60.000,00 x 1 Ton

= Rp. 60.000.000,-/Bulan

Artinya secara ekonomis berdasarkan perhitungan di atas sangat benilai ekonomi untuk bisa dikembangkan. Peternakan magot bisa dikembangkan tentunya herus melibatkan semua pihak, pemerintah, peternak, pengelola sampah, sehingga benar-benar bisa menarik minat dan perhatian masyarakat untuk peduli lingkungan dan mau beternak magot. Pemeritah bisa terus mengadvokasi, sosialisasi, pembinaan, edukasi, menyediakan sarana dan prasarana dan tempat untuk mengembangkan

magot.

4.5.2. Bank Sampah

Model pengelolaan sampah rumah tangga sirkular yang dilakukan langsung oleh masyarakat Kota Tasikmalaya yaitu melakukan pemilahan dan pengumpulan langsung dari rumah. Sampah dipilah menjadi dua kategori yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini dilakukan di bank-bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Tasikmalaya. Sampah organik yang dikumpulkan di jual atau dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku pakan ternak maggot BSF. Sedangkan sampah anorganik yang dikumpulkan dijual langsung ke bakul rongsok atau ditabung melalui bank sampah yang nantinya dijual ke pengepul dan akhirnya dijadikan bahan baku industri daur ulang.

Memanfaatkan, mendaur ulang sampah merupakan dasar prinsip dari model sirkular penggelolaan sampah. Praktik *circular* secara general yaitu restorasi dan regenerasi, restosi lebih kepada upaya daur ulang sedangkan regenerasi lebih pada aspek pembatasan penggunaan sumber daya material dan guna ulang suatu produk setelah tidak digunakan. Pengelolaan sampah model sirkular bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, mengubahnya menjadi sumber daya, terkait efisiensi dalam hal pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Dan akhirnya sampah yang di kirim ke TPA akan semakin berkurang.

Bagan. 4.1. Prinsip Ekonomi Sirkular pada Pengelolaan Sampah

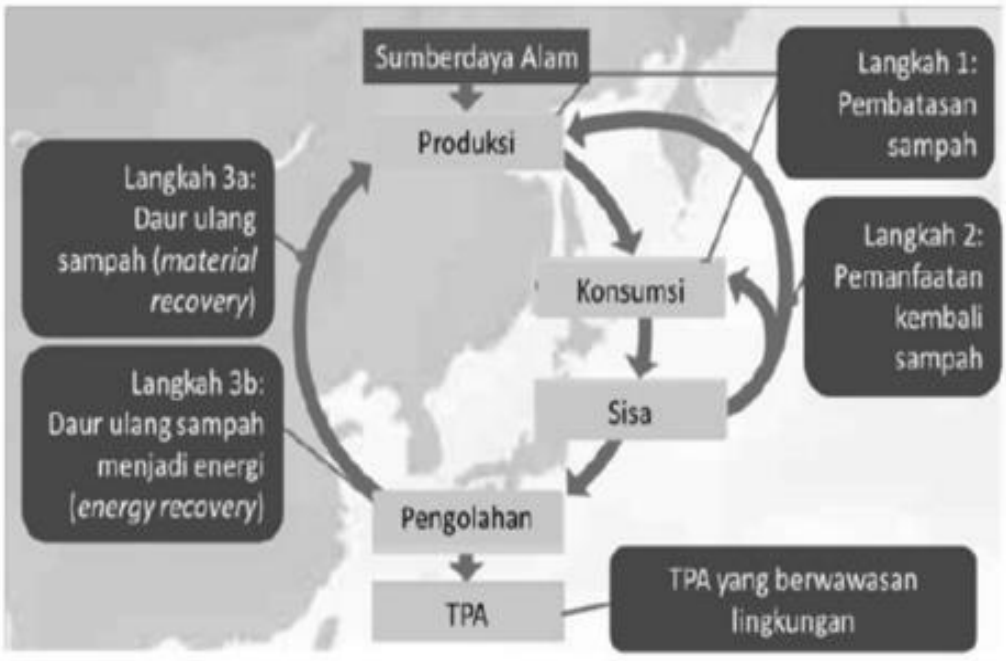

Sumber: Int J Environ Res Public Health. 2019

Berikut adalah bank sampah di wilayah Kota Tasikmalaya:

Tabel. 4.7. Daftar Bank Sampah

No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Tahun Berdiri dan SK		Jumlah Sampah yang Terkelola (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	Kembang Hurip	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	2019	660.2/Kep.09/2019	379.7	Aktif	1 RW	51	11	762,667
2	Puspasari	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	2017	660.2/Kep.58/2017	149.2	Aktif	1 RW	95	14	310,054
3	Saripin Bersinar	Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya	2022	660.2/Kep.10/2022	152.6	Aktif	1 RW	23	9	422,333
4	Dwi Mekar	Kel. Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya	2020	660/SK-35/VII/KEL/2020	0.0	Tidak Akt	1 RW	75	5	-
5	Sabilulungan	Kel. Sukamaju Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	2018	800/ Kep. 023-pem/2018	106.8	Aktif	1 RW	150	3	242,667
6	Asri Mandiri	Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	2014	658.1/Kep.006/Kec/2014	983.7	Aktif	1 RW	180	18	1,868,167
7	Mandiri	Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	2021	658.1/SK. 42/KEL	2,969.2	Aktif	1 RW	232	16	6,776,333
8	Tugu Harapan	Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya	2022	660/Sk.18/Kel/2022	818.6	Aktif	Kelurahan	211	14	1,623,500
9	Sobat Penyamar	Kel. Margabakti Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2021	648 / Kep. Iia /2021	217.7	Aktif	1 RW	92	8	435,333
10	Warga Peduli	Kel. Setianagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2018	660.2/6/Kel/2018	261.0	Aktif	4 RW	200	6	687,833
11	Pasir Ipis Mandiri	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2018	147/Kep.40/Kel/2018	220.1	Aktif	1 RW	125	9	441,167
12	Gunlip	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2018	38b/Kep/2018	142.2	Aktif	1 RW	7	8	307,167
13	Kilat Buana	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2021	648/Kep.005/2021	339.6	Aktif	1 RW	93	6	640,083
14	Sugema	Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2021	658.1/SK.40/Kel.	1,979.2	Aktif	1 RW	752	18	3,497,000
15	Sehat Mandiri	Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2020	400/32/SK/Kel/2020	559.2	Aktif	1 RW	70	8	1,357,233
16	Ciherang Tunas Mulia	Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2020	474/IX/Kel/2020	816.3	Aktif	RW	200	8	1,773,167
17	Cikalang Mandiri	Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	2021	660.2/kep.24/kel.cklg/2021	110.5	Aktif	3 RW	47	9	290,833
18	Galih Mandiri	Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	2022	400/32/SK/Kel/2022	479.4	Aktif	2 RW	93	12	1,070,500
19	Ligar Sapari Mandiri	Kel. Sambongpari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya	2022	648/Kep.01/2022	63.9	Aktif	Kelurahan	84	13	140,450
20	Setia Mulya Bersih	Kel. Setiamulya Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya	2021	648/Kep.11/Kel.Stmly/2021	1,251.7	Aktif	8 RW	100	10	2,470,000
21	Cikal	Kel. Karanganyar Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya	2021	658.1/001/viii/kel/2021	1,543.4	Aktif	1 RW	88	7	2,290,167
22	Si Mekar	Kel. Setianagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2022	658.Kep.22/Kel.Stngr/XII/2022	483.5	Aktif	3 RW	110	19	967,000
23	Rahayu Sukmajaya	Kel. Sukamaju kaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	2022	149/SK.007/Kel.	575.0	Aktif	1 RW	161	14	1,150,000
24	Ciherang Tunas Mulia #1	Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	2020	660/74/Kel/II/2022	540.0	Aktif	2 RW	78	10	1,080,000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dalam rangka pengurangan sampah tahun 2023 mempunya sarana antara lain:

Terdapat satu bank sampah induk yang dikelola dilingkungan kantor DLH Kota Tasikmalaya, juga terdapat 25 bank sampah yang belum terverifikasi dan belum terlihat aktifitasnya, bank-bank sampah tersebut belum memberikan laporan berkala kepada DLH.

Tabel. 4.8. Bank Sampah Induk

No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Tahun Berdiri dan SK		Jumlah Sampah yang Terkelola (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	SI RESIK	Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalay	2019	800/014/DLH/202	849.8	Aktif	Kota	489	9	1,995,900

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dengan menganalisis data tersebut di atas terlihat jelas bagaimana ekonomi sirkular berbasis kewiraushaan yang dalam hal ini mengolah sampah menjadi barang bermanfaat mempunyai nilai ekonomis dan menyerap tenaga kerja. Dari data di atas dari 25 bank sampah yang sudah terdata dan secara berkala membuat laporan di DLH Kota Tasikmalaya rata perbulan menghasilkan omset sebesar Rp. 32.599.554,- dengan penyerapn tenaga kerja sebanyak 264 orang, dengan rata-rata sampah yang terkelola sebanyak 15.993 Kg/Bulan. Kalau dihitung rata-rata per tahun omset Rp. 32.599.554,- x 12 = 391.194.648,- dan sampah yang terkelola sebanyak 15.993 x 12 = 191.916 Kg/Tahun.

Di Kota Tasikmalaya masih terdapat 25 bank sampah yang tercatat namun belum melakukan laporan berkala. Melihat fenomena seperti itu di prediksi masalah sampah akan segera tertangani dengan baik. Dengan pola pemberdayaan dan pembinaan yang tepat akan terus mendorong pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang banyak, serta sampah yang di kirim ke TPA akan semakin berkurang.

Dalam pengelolaan sampah perlu adanya elaborasi dan kolaborasi dari semua pihak diantanya pemerintah daerah, masyarakat umum, wirausaha, aktivitas lingkungan dan akademisi. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab moral terhadap kondisi lingkungan sekitar salah satunya dengan pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*). Peningkatan edukasi dan pendampingan masyarakat dapat meningkatkan proses pembentukan bank sampah, pengomposan dan daur ulang dalam hal ini pemerintah dan swasta berkolaborasi dalam penyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan. Peningkatan bank sampah, composting dan daur ulang berpotensi terhadap pembukaan bisnis baru seperti bisnis pupuk organik, bisnis produk daur ulang, bisnis mebel dari limbah plastik. Tujuan pokok dengan adanya bank sampah adalah pemberdayaan masyarakat bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Gambar. 4.11. Bank Sampah



Bank Sampah Ciherang



Sampah Hasil Pemilahan

Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bank sampah di wilayahnya diantaranya adalah:

1. Bank Sampah dengan program menukar sampah dengan imbalan tertentu sesuai dengan jenis sampah (sampah sudah dipilih dan dipilah). Bagi siswa yang kurang mampu bisa dipergunakan untuk membayar uang sekolah (sekolah bekerjasama dengan pemda dan bank sampah setempat). Sampah bisa ditukar dengan sembako (beras, minyak, gula, dll) sebagai penganti imbalan bagi masyarakat kurang mampu, ada juga di bank sampah hasil penjualan sampah masyarakat ditabung di bank sampah untuk pembayaran PBB, dll.
2. Program *Composting* dapat dilakukan dengan membantu warga yang membutuhkan pupuk kompos dan dapat diperjualbelikan di luar daerah sebagai potensi produk unggulan desa.
3. Program Industri kecil daur ulang yang bekerja sama antara pemerintah daerah dengan swasta terkiat produk dan distribusi penjualan dari produk barang jadi, bahan setengah jadi atau bahan mentah berupa limbah kaca/botol/kardus/kertas, konstruksi dan limbah plastik dari jenis serta turunannya seperti: biji plastik, plastik kemasan, botol plastik, dll.

Bagan. 4.2. Diagram Alir Pemilahan Sampah di Bank Sampah



Sumber: Data Diolah di Bank Sampah Ciherang

Dengan mempelajari data di atas terdapat nilai ekonomis yang ditimbulkan dengan adanya bank sampah, terlihat dengan adanya penabung dengan nilai rupiah, masyarakat menjual sampahnya di bank sampah yang kemudian uang penjualannya ditabung dan dikelola oleh pengelola bank sampah, untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan para penabung tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktivis lingkungan dan pengelola bank sampah, didapat informasi tentang manfaat bank sampah antara lain:

1. Meningkatkan jiwa gotong royong.
2. Meningkatkan kekreativitasan.
3. Meningkatkan jiwa *entrepreneur*.
4. Menambah perekonomian keluarga.
5. Masyarakat menjadi mengetahui terkait pemilahan sampah yang benar dan tepat.
6. Menerapkan jiwa mengenal lingkungan hidup.
7. Semakin berkembangnya kewirausahaan sosial pada masyarakat.

Selain itu terdapat juga kelemahan atau hambatan dalam pengembangan bank sampah diantaranya:

1. Kurangnya daya tarik masyarakat terkait peduli dengan sampah.
2. Harga satuan sampah yang masih naik turun.
3. Kaderisasi organisasi pada bank sampah.
4. Kurangnya komitmen dalam bekerjasama dalam pengembangan bank sampah.

Perlu adanya perubahan paradigma di masyarakat bahwa sampah bisa menjadi salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat (Kristianto, 2020). Ekonomi sirkular kerakyatan merupakan sebuah konsep ekonomi yang meregenerasi sampah menjadi produk yang bernilai tambah (*added value*). Cara mengatasi dimulai dari sumber sampah yaitu dari hulu ke hilir, hal ini dilakukan agar biaya penanggulangan sampah yang dikeluarkan pemerintah dapat dikurangi, namun pemerintah daerah sebaiknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengusaha, akademisi dan aktifis lingkungan hidup untuk memberikan edukasi, pendampingan dan pelatihan hingga masyarakat mandiri baik secara ekonomi dan sosial. Hal ini juga bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang mereka hasilkan. Namun tentunya tidak bisa dilakukan dengan cepat karena harus melalui proses yang baik sehingga tepat sasaran, juga terdapat banyak kelemahan yang ada diantaranya tempat, kuragnya edukasi pada masyarakat, perlu adanya bapak angkat dan modal.

Program pendampingan dan pelatihan manajemen sampah berbasis masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dengan target luaran yang dihasilkan oleh masyarakat. pemerintah daerah sebaiknya memfasilitasi setiap kelurahan dengan mendirikan bank sampah, bekerja sama dengan pengusaha terkait inovasi dan kreasi produk dari sampah yang berpotensi menjadi produk bernilai jual seperti pupuk padat organik, POC (Pupuk Organik Cair, *Ecoenzym*, komposter (bag/tong), paving dari limbah plastik, biogas dari limbah organik, dll.

Kemiskinan menjadi problem utama dalam perekonomian suatu negara begitu juga terkait isu pengangguran. Peran SDGs dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran akan lebih maksimal jika pemerintah dapat menggandeng atau

bekerja sama dengan lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga filantropi lainnya. Selain terbebas dari nggaran pemerintah yang terbatas, lembaga sosial saat ini juga sudah mampu dan ahli dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga tujuan dari SDGs ini dapat tercapai dengan cepat.

Pengelolaan sampah dari, oleh dan untuk masyarakat adalah sebagai upaya penanganan, pengendalian sampah seyogyanya melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat. Berbagai upaya dalam memanfaatkan kembali sampah organik maupun nonorganik berbasis kerakyatan menjadi produk produk yang bernilai ekonomis telah lakukan diantara lain: pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, pembuatan *eco-brick*, limbah kotoran hewan dalam bentuk biogas, maupun sampah organik daun /ranting kering menjadi arang briket (*bio-briket*).

Perlu adanya campur tangan dari berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, perusahaan dan aktivis lingkungan. Keterlibatan antar pemangku kepentingan bisa mengembangkan partisipasi masyarakat dalam manajemen sampah. Pengelolaan sampah baik skala besar maupun skala kecil, bila harus mencapai tujuan nya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan adalah peran serta masyarakat. Kebijakan penerapan ekonomi sirkular bersifat multisektor dan membutuhkan keterlibatan secara sinergis pemangku kepentingan yang terkait karena dibutuhan skema pengaturan hulu ke hilir.

Artinya dengan pemberdayaan, pendampingan, perlindungan, pembinaan dan kepedulian secara berkelanjutan dari lintas sektor kepada para pelaku ekonomi

sirkular akan membuat para pelaku menjadi semangat dan tidak pernah berhendi peduli terhadap lingkungannya.

4.6. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial di Kota Tasikmalaya, yaitu untuk melihat *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threathen* (ancaman), dan menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial di Kota Tasimalaya. Kajian ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities* dan *Threats*) yang hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan. Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan, antara lain:

1. **S** (*Strength* atau Kekuatan). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau dimiliki yang dianggap merupakan hal yang sudah baik.
2. **W** (*Weakness* atau Kelemahan). Suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.
3. **O** (*Opportunity* atau Kesempatan). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
4. **T** (*Threat* atau Ancaman). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dapat dianggap menghambat atau mengancam pengembangan potensi.

Sebelumnya perlu didahului dengan identifikasi terhadap permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang, serta potensi yang dimiliki pada saat ini. Selanjutnya hasil identifikasi ini dianalisis untuk memperoleh solusi dalam pengembangan wilayah dan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya.

Berdasarkan identifikasi SWOT, maka perlu dibuat skenario untuk memberi arahan bagi pengembangan Ekonomi Sirkular melalui Kewirausahaan Sosial di Kota Tasikmalaya, yang pada intinya skenario yang dipilih harus mampu menjawab upaya untuk mengoptimalkan unsur positif (*Strengths* dan *Opportunities*) dan meminimalkan unsur negatif (*Weakness* dan *Threats*). Penerapan skenario yang ada di bagi menjadi 2 skenario utama yaitu:

1. Skenario progressif: dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mendukung percepatan meraih peluang dan meminimalkan ancaman yang ada.
2. Skenario penetratif: dengan mendayagunakan hasil pencapaian peluang yang ada untuk menetralisir ancaman yang mungkin timbul.

Menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor untuk tabel internal dan eksternal dibuat dengan teknik skala seperti sebagai berikut:

1. Bobot nilai
   - 1.00 = Sangat Penting
   - 0.75= Penting
   - 0.50 = Standar
   - 0.25 = Tidak Penting
   - 0.10 = Sangat Tidak Penting

2. Rating Nilai

- 5 = Sangat Penting
- 4 = Penting
- 3 = Netral
- 2 = Tidak Baik
- 1 = Sangat Tidak Baik

Analisa matriks SWOT didasarkan pada kecenderungan dari gambaran potensi dan kendala yang ada baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Untuk lebih jelasnya, matriks SWOT dapat diuraikan berikut ini:

Tabel. 4.9. IFAS

Faktor Internal (Strength & Weakness)				
No	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
	Kekuatan			
1	Sampah sebagai modal utama dalam wirausaha sosial	0,06	4	0,24
2	Ketersediaan sampah yang melimpah	0,06	5	0,31
3	Metode kreatif masyarakat	0,04	3,5	0,14
4	Pemanfaatan media sosial secara optimal untuk wirausaha sosial	0,06	4	0,24
5	Sampah bisa didaur ulang	0,04	3,5	0,14
6	Wirausaha sosial tidak berbasis profit	0,06	4	0,24
7	Bank sampah sebagai salah satu gerbang ekonomi	0,06	4	0,24
8	Terdapat banyak bank sampah di kota Tasikmalaya sekaligus sebagai pelaku wirausaha sosial	0,04	4	0,16
Sub total				1,73
	Kelemahan			

Faktor Internal (Strength & Weakness)				
No	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
1	Image buruk sampah (kotor, bau, dll)	0,06	2,9	0,18
2	Pemilahan sampah	0,04	2	0,08
3	Tidak semua sampah bisa dimanfaatkan	0,06	2	0,12
4	Penunjang untuk pengolahan sampah masih kurang	0,06	2	0,12
5	Kurangnya support dari pemerintah bagi penggiat sampah	0,04	2	0,08
6	Tidak ada payung hukum untuk konsumsi produk hasil daur ulang	0,06	2,9	0,18
7	Pendanaan pengelolaan bank sampah kurang	0,02	2	0,04
8	Produk hasil pemanfaatan dari sampah kurang bernilai jual dari segi kualitas	0,04	2,9	0,12
9	Image bank sampah kurang baik, meskipun banyak manfaat dari sampah itu sendiri	0,06	2	0,12
10	Pemasaran hasil daur ulang sampah tidak jelas	0,06	2,9	0,18
11	Kemasan produk hasil limbah atau daur ulang sampah masih seadanya	0,06	1	0,06
		1		
Sub total				1,28
Total				0,45

Sumber: Data diolah hasil FGD

Tabel. 4.10. EFAS

Faktor Ekternal Opportunity & Threats				
No	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
	Peluang			
1	Banyak lahan pertanian sehingga kompos bisa dimanfaatkan	0,11	4	0,44
2	Sampah sebagai pakan magot yang memiliki nilai ekonomi lumayan tinggi	0,11	5	0,56

3	Banyak instansi pemerintah yang bisa dijadikan pasar	0,07	3	0,22
4	Peternak	0,11	4	0,44
Sub total				1,67
	Ancaman			
1	Impor sampah	0,11	1	0,11
2	Masyarakat lebih memilih produk baru daripada hasil daur ulang dari sampah	0,07	1	0,07
3	Sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan limbah dari dapur	0,11	2	0,22
4	Jiwa wirausaha sosial yang minim di Masyarakat	0,11	1	0,11
5	Tidak ada investor untuk para wirausaha sosial	0,07	2	0,15
6	Penjiplakan ide, konsep dan konten	0,11	1	0,11
		1		
Sub total				0,78
Total				0,89

Sumber: Data diolah hasil FGD

Tabel. 4.11. Analisis Matrik SWOT Ekonomi Sirkular dan Kewirausahaan Sosial

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. Sampah sebagai modal utama dalam wirausaha sosial 2. Ketersediaan sampah yang melimpah 3. Metode kreatif masyarakat 4. Pemanfaatan media sosial secara optimal untuk wirausaha sosial 5. Sampah bisa didaur ulang 6. Wirausaha sosial tidak berbasis profit 7. Bank sampah sebagai salah satu gerbang ekonomi 8. Terdapat banyak bank sampah di kota Tasikmalaya	1. Image buruk sampah (kotor, bau, dll) 2. Pemilahan sampah 3. Tidak semua sampah bisa dimanfaatkan 4. Penunjang untuk pengolahan sampah masih kurang 5. Tidak adanya support dari pemerintah bagi penggiat sampah 6. Tidak ada payung hukum untuk konsumsi produk hasil daur ulang 7. Pendanaan pengelolaan sampah kurang

FAKTOR EKSTERNAL	sekaligus sebagai pelaku wirausaha sosial	8. Produk hasil pemanfaatan dari sampah kurang bernilai jual dari segi kualitas 9. Image bank sampah kurang baik, meskipun banyak manfaat dari sampah itu sendiri 10. Pemasaran hasil daur ulang sampah tidak jelas 11. Kemasan produk hasil limbah atau daur ulang sampah masih seadanya
PELUANG 1. Banyak lahan pertanian sehingga kompos bisa dimanfaatkan 2. Sampah sebagai pakan magot yang memiliki nilai ekonomi lumayan tinggi 3. Banyak instansi pemerintah yang bisa dijadikan pasar 4. Peternak	**STRATEGI (SO)** 1. Pelatihan ekonomi kreatif 2. Pelatihan digital marketing melalui media sosial 3. Koordinasi antar instansi untuk penyerapan hasil olahan/daur ulang sampah 4. Pemetaan lahan pertanian 5. Pemetaan peternak 6. Memperkuat sinergi bersama dengan mitra Kerjasama bank sampah dalam menarik minat masyarakat dalam pengelolaan bank sampah serta dalam pengembangan bank sampah 7. Meningkatkan ide, inovasi dan kekreativitasan masyarakat dengan mengikuti pameran dan pelatihan. 8. Membangun bank sampah disetiap kelurahan 9. Kerjasama lintas sektor dalam pemasaran produk olahan bank sampah berupa magot, kompos dan barang kreatif.	**STRATEGI (WO)** 1. Penataan lay out bank sampah 2. Penyediaan alat pencacah sampah organik dan non organik 3. Dibuat Perda tentang penyerapan produk hasil daur ulang sampah pada instansi pemerintah 4. Pemerintah setempat memberikan insentif atau sejenisnya bagi penggiat sampah 5. Stimulan dana untuk bank sampah 6. Pelatihan produk dan packaging 7. Workshop 8. Edukasi yang berupa wawasan kepada masyarakat terkait bank sampah 9. Menjadikan bank sampah mandiri memiliki legalitas yang resmi dari pemerintah
ANCAMAN 1. Impor sampah 2. Masyarakat lebih memilih produk baru daripada hasil daur ulang dari sampah 3. Sebagian besar masyarakat tidak	**STRATEGI (ST)** 1. Program pengelolaan sampah oleh komunitas lokal di daerah setempat 2. CSR 3. Memobilisasi Bauran Pembiayaan untuk Infrastruktur Pengumpulan	**STRATEGI (WT)** 1. Pemilahan sampah dari rumah (organik, non organik, kertas, plastik) 2. Sosialisasi pengembangan wirausaha sosial untuk menajak masyarakat tertarik mengembangkan wirausaha sosial.

memanfaatkan limbah dari dapur 4. Jiwa wirausaha sosial yang minim di masyarakat 5. Tidak ada investor untuk para wirausaha sosial 6. Penjiplakan ide, konsep dan konten	dan Pemilahan Sampah Sirkular 4. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 5. Pengoptimalisasian pemasaran kerajinan olahan sampah dengan cara memperbaiki sistem promosi agar produk yang dihasilkan dapat dikenal dan tersebar luas 6. Sosialisasi pengembangan kewirasahaan sosial. 7. Pencarian bapak angkat dalam pengelolaan bank sampah	3. Perubahan pola pikir masyarakat terkait dengan komitmen yang dilakukan pada saat melaksanakan pengelolaan sampah di bank sampah 4. Kaderisasi pengelola bank sampah 5. Pemahaman kegunaan sampah masyarakat menjadi barang yang berguna 6. Edukasi terus menerus tentang sampah dan bank sampah 7.

Berdasarkan analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT terhadap ekonomi sirkular melalui wirausaha sosial, diperoleh nilai kekuatan = 1,73 kemudian nilai kelemahan = 1,28 dan nilai kesempatan = 1,67 serta nilai hambatan adalah = 0,78. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dihitung koordinat sumbu X (sumbu horizontal) dan sumbu Y (sumbu vertikal), yang sekaligus menunjukkan posisi ekonomi sirkular melalui wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya

1. Sumbu X = (S – W) : 2 = (1,73 - 1,28) : 2 = 0,23

2. Sumbu Y = (O – T) : 2 = (1,67 - 0,78) : 2 = 0,44

Selanjutnya dengan menggunakan nilai koordinat pada sumbu X dan sumbu Y tersebut dapat dipetakan posisi ekonomi sirkular melalui wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya seperti diagram berikut ini.

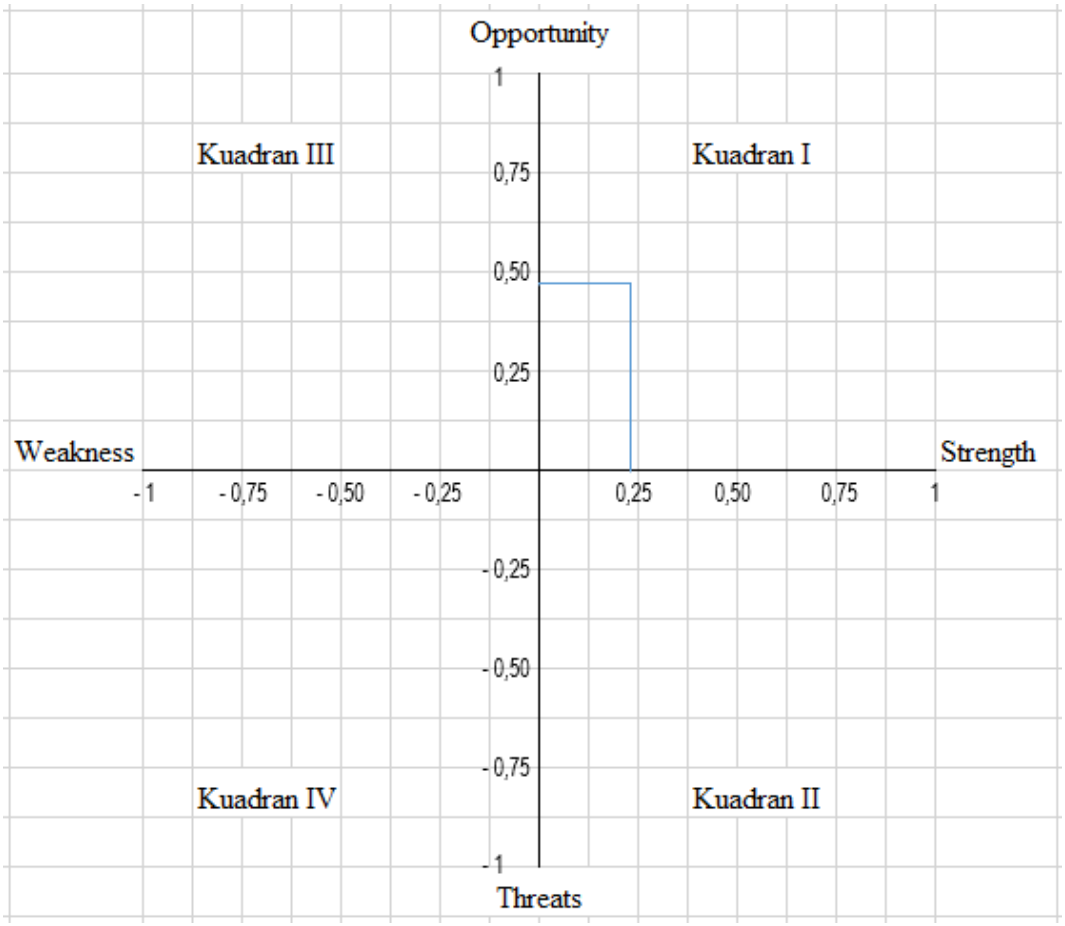

Berdasarkan diagram di atas bisa diketahui posisi ekonomi sirkular melalui wirausaha sosial di Kota Tasikmalaya Berada di kuadran I, artinya disarankan untuk melakukan strategi progresif dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mendapatkan keuntungan dari peluang ekternal.

4.7. Peta Jalan dan Analisis Kebutuhan.

Berdasarkan hasil FGD dan kajian literatur maka team merumuskan analisis kebutuhan dengan fokus di bawah ini:

Tabel 4.12. Analisis Kebutuhan

No.	Sektor	Pemetaan Permasalahan	Target Pemerintah Daerah (PEMDA)	Target Implementasi Model Ekonomi Sirkular
1	Persampahan	1. Pengolahan sampah yang mendesak karena volume bertambah. 2. Dana APBD terbatas biaya pengadaan alat berat, perluasan lahan. dll . 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah. 2. Berkurangnya timbulan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. 3. Membangun bank sampah 4. Meningkatnya kualitas udara, air, dan tutupan lahan 5. Pelibatan lintas sector dalam mengatasi permasalahan sampah	1. Meminimalisasi sampah organik dengan penerapan teknologi tepat guna 2. Menimalisir pengeluaran APBD untuk pengolahan sampah 3. Pendampingan dan pengembangan budi daya magot dan kompos. 4. Pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial. 5. Membuat paying hukum dalan pengelolaan sampah.
2	Pangan	1. Kebutuhan pangan semakin meningkat 2. Diperlukannya ketahanan pangan untuk menghadapi kekurangan pangan 3. Kekurangan asupan protein akan menyebabkan gizi buruk	1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program penanggulangan gizi buruk 4. Mengembangkan pertanian berbasis organik	1. Menciptakan pangan mandiri yang dapat mencukupi kebutuhan 2. Mencari sumber protein baru untuk menutupi kebutuhan gizi. 3. Pemanfaatan produk pupuk dari pengolahan sampah berupa kompos dan magot

3	UMKM	1. Kurang maksimal pengembangan usaha kecil di desa. 2. Kurang memahami potensi desa sebagai sumber usaha baru	1. Program peningkatan usaha. 2. Pemanfaatan kelurahan secara optimal dan tepat guna. 3. Program pemberdayaan BUMD untuk mendukung usaha di kelurahan	1. Memberdayakan kearifan lokal dalam menciptakan usaha baru. 2. Memberikan bimbingan teknis dan non-teknis di dalam pengelolaan usaha mandiri. 3. Pembentukan pengelolaan usaha mikro yang transparan dan berkelanjutan
4	Perindustrian	1. Industri kecil belum terlalu banyak disentuh. 2. Kurang memahami potensi yang ada sebagai suatu industri baru. 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan didapat apabila transaksi hanya berupa penjualan komoditi	1. Program penciptaan industri baru berbasis pertanian dan usaha kecil 2. Program kerjasama CSR/CSV dengan industri besar	1. Menjadikan Desa sebagai tulang punggung perkotaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya 2. Pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif. 3. Pemanfaatan CSR/CSV untuk industri kecil 4. Memberi kesempatan terciptanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset
No.	**Sektor**	**Pemetaan Permasalahan**	**Target Pemerintah Daerah (PEMDA)**	**Target Implementasi Model Ekonomi Sirkular**
5	Pendidikan	1. Kurangnya pendidikan vokasi yang dapat mendukung industri kecil dan usaha mikro. 2. Kurangnya edukasi sejak dini dan berkelanjutan	1. Program peningkatan pendidikan untuk menjembatani perbedaan latar belakang pendidikan. 2. Program kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan industri kecil 3. Menyiapkan program edukasi sejak dini, baik di sekolah formal maupun non formal.	1. Pengembangan edukasi berbasis energi terbarukan. 2. Pengembangan edukasi berbasis pengolahan sampah untuk produk bermanfaat dan bernilai ekonomis 3. Pengembangan edukasi berbasis ekonomi sirkular. 4. Pengembangan edukasi berbasis pariwisata
6	Pariwisata	Belum adanya wisata yang mengintegrasikan pendidikan dan bisnis	Program pengembangan obyek wisata baru	1. Pengembangan agrowisata. 2. Pengembangan ekowisata.

				3. Pengembangan teknowisata

Sumber: Pengolahan Data Team Ahli

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Limbah dan sampah saat ini seharusnya sudah bukan lagi dianggap sebagai objek yang hanya dibuang begitu saja akan tetapi sudah harus dipandang sebagai sumber daya. Oleh karena itu dengan analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial mendatangkan dampak positif dari sisi ekonomi tapi juga dapat tetap berwawasan lingkungan jika dikelola menggunakan konsep sirkular ekonomi yang didukung teknologi-teknologi pengolahan limbah yang tepat. Hanya membutuhkan komitmen dan kemauan dari seluruh pihak yang terkait untuk bersama mengimplementasikannya menjadi sebuah wujud nyata.

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya didapat beberapa kesimpulan dan saran dalam penerapan Stategi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Ekonomi Sirkular Melalui Potensi Wirausaha Sosial di Kota Tasikmalaya.

5.1. Kesimpulan:

1. Model ekonomi sirkular adalah paradigma pertumbuhan baru yang mulai menyebar secara bertahap dan pasti di seluruh dunia. Transformasi pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan konsep berbasis ramah lingkungan menjadi target utama di seluruh dunia.
2. Model ekonomi sirkular akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak pandemik.

3. Model ekonomi sirkular harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital melalui industrialisasi dengan menjaga daya dukung dan daya tampung daerah.
4. Model ekonomi sirkular akan meningkatkan standar hidup bagi masyarakat sekitar karena hidup akan lebih sehat dan bermanfaat bagi lingkungan.
5. Model ekonomi sirkular dibutuhkan oleh Kota Tasikmalaya untuk mengoptimalisasi aset Pemerintah Daerah dan membuka kesempatan menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial dapat menggali potensi dan pengembangnnya, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis yang baik.
7. Pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial di Kota Tasikmalaya harus menggabungkan kekuatan beberapa pemangku kepentingan, seperti: Pemerintah Daerah, BUMD, KSM, Koperasi, Pihak Pendana, Pihak Pengusaha, Pihak Komunitas, Pihak Akademisi, Pihak Media, dan generasi muda (mahasiswa dan pengusaha muda). Masing-masing mengambil peran yang sama pentingnya dan saling bersinergi satu sama lain.
8. Pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial di Kota Tasikmalaya memfokuskan pada sektor penyelamatan lingkungan, melalui penerapan: pengolahan sampah dan pupuk organik.
9. Implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dengan model sirkular telah dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah anorganik dari rumah tangga.

10. Strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga model sirkular dari analisis SWOT menggunakan strategi SO, yaitu dengan peningkatan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah rumah tangga oleh Pemerintah Daerah, optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penyediaan pangsa dan jejaring informasi terkait produk hasil dari pengelolaan sampah rumah tangga.

5.2. Rekomendasi:

1. Perlunya singkronisasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya pengelolaan sampah yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
2. Terus menerus secara berkesinambungan melakukan sosialisasi melalui pelatihan serta pembinaan tentang sampah permasalahan dan solusinya.
3. Adanya payung kerjasama lintas sektor dalam pengembangan ekonomi sirkular berbasis kewirausahaan sosial.
4. Pengembangan ekowisata yang terintegrasi dengan ekonomi sirkular.
5. Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pemanfaatan sampah non organik.
6. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat khusus pengelola sampah masyarakat sebaiknya membuat lembaga badan hukum dan badan usaha, misalnya Koperasi dan dikelola dengan professional.
7. Mengembangkan pertanian organik atau membuat kawasanan agropolitan.
8. Peraturan Pemerintah bagi pengusaha tentang tanggung jawab akan sampah yang dihasilkan oleh industri.

9. Peraturan daerah secara khusus tentang bank sampah.
10. Melakukan studi banding ke daerah lain yang telah maju pengelolaan sampahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal. *Ekonomi Sosial dan Bisnis Sosial.* http://socialinvesment.id/artikel/ekonomi-sirkular-dan-bisnis-sosial/ (diakses tnggal 10 Oktober 2023.

AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pusaka Pelajar, 2005.Yogyakarta. Hal. 2

Andersson, F. O., & Ford, M. Reframing social entrepreneurship impact: Productive, unproductive and destructive outputs and outcomes of the Milwaukee school voucher programme. *(Journal of Social Entrepreneurship, 6(3), 2015).* Hal. 299–319

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Hal. 115

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 12

Bardach, Eugene. *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Effective Problem Solving.* New York: Seven Bridges Press, 2000). Hal.13

Camarsa, G. et al. LIFE and the Circular Economy', in Life Environment. *European Commission Environment Directorate- GeneraL, 2017. p. 104. doi: 10.2779/29436*

Coletta, V. R. et al. 2021. Causal Loop Diagrams for Supporting Nature Based Solutions Participatory Design and Performance Assessment. *Journal 0f Environmental Management, 2021. p. 280. Doi: 10.1016/J.Jenvman.2020.111668.*

Coyanda, J. R. Model Technopreneur IT Mahasiswa Pada Masa Pandemic Covid 19 dengan Metode Business Model Canvas. *(Jurnal Ilmiah Informatika Global, 2020).* 11(1), 27–32. https://doi.org/10.36982/jig.v11i1.1069

Cui, J. *The impact of entrepreneurship curriculum with teaching models on*

sustainable development of entrepreneurial mindset among higher education students in China: the moderating role of the entrepreneurial climate at the institution. (Sustainability, 2021).Hal. 13(14), 7950.

David, R. Fred. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998. Hal. 23.

David. *Manajemen Strategi Konsep.* Jakarta: Selemba Empat, 2004. Hal. 14.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat).* P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Hal. 190

Djam`an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011) Hal.117.

Dodo, F., Raimi, L., & Rajah, E. B. *Social entrepreneurship and SDGs: Case studies from northeast Nigeria*. (Emerald Emerging Markets Case Studies, 2021). Hal. 11(4), 1–38.

Doh, S. *Social Entrepreneurship and Regional Economic Development: The Case of Social Enterprise in South Korea.* Sustainability (Switzerland), 2020. Pp. 12(21),

E, Macarthur. 2021. *Universal Circular Economy Policy Goals*. In Ellen Macarthur Foundation, 2021. Hal. 20

Ebrashi, R. E. Social Entrepreneurship Theory and Sustainable Social Impact. *Social Responsibility Journal, 9(2), 2013. Pp. 188– 209. https://doi.org/10.1108/SRJ-07- 2011-0013*

Efendi, Mansur. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnall Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017. Hal. 21- 38.*

Effendi, Marwan. *Teori hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Refferensi*. Jakarta, 2013. Hal. 288.

Ellen MacArthur Foundation. *Towards a Circular Economy*. Business Rationale for an Accelerated Transition, 2015. Hal. 2

Ellen MacArthur Foundation. *Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition*. Ellen MacArthur Foundation, 2015. pp. 5-7

Fasa, Angga Wijaya Holman. Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding, 2021. Vol. 10 No. 3. Hal 339-357*

Febrian, A. F., & Maulina, E. *The influence of social capital and financial capability on sustainable competitive advantage through entrepreneurial orientation: Empirical evidence from Small and Medium Industries in Indonesia using PLS-SEM, 2018.* Hal. 5(12), 218–232.

Firdaus, Nur. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 22, No. 1, 2014. Hal. 55-67*

Fred. R. David. *Strategic Management Concepts.* New Jersey: Prentice Hall, 2001. Hal. 115.

Freddy, Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Cet-14, 1997. Hal. 12.

Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992. Hal.. 21-22

Geissdoerfer M, Morioka SN, de Carvalho MM, Evans S. Business models and supply chains for the circular economy.*(Journal of Cleaner Production, 2018)*. Hal. 190: 172-190.

Goyal, S., Agrawal, A., & Sergi, B. S. Social entrepreneurship for scalable solutions addressing sustainable development goals (SDGs) at BoP in India. *(Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 2021)*. Hal. 16(3/4), 509–529.

Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hal.29.

Hitt Michael, dkk. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Erlangga, 1997. Hal.137.

Idris, A., & Hijrah H., R. Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship, 4(3), pp. 277–301. https://doi.org/10.1080/19420676, 2013. 820778*

Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI, 2006. Hal. 101.

Irma Paramita Sofia. Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian. Widyakala*: Jurnal Universitas Pembangunan Jaya, Vol. 2, No. 1, 2017. Hal. 2-23.*

Iskandar, Y., & Kaltum, U. *The Relationship between Intellectual Capital and*

Performance of Social Enterprises: A Literature Review. 2021.

José Potting, M. P. Hekkert, Ernst Worrell, dan Aldert Hanemaaijer. *Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain.* No. 2544. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2017. pp. 9

Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Kerajaan Denmark, UNDP Indonesia. *Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia*, 2021. Hal. 8.

Keraf, AS. (2022). *Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022). Hal.57-89.

Keraf, Soni. *Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022. Hal. 10

Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. (*Resources, Conservation and Recycling Journal, vol. 127, 2017*). Hal. 221-232.

Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling Journal, vol. 127, 2017*. Hal. 221-232.

Konda, I., Starc, J., & Rodica, B. *Social Challenges are Opportunities for Sustainable Development: Tracing Impacts of Social Entrepreneurship Throug Innovations and Value Creation.* (Economic Themes, 2015). Hal. 211– 229.

Lacy, P., Long, J. & Spindler, W. *The Circular Economy Handbook.* (Palgrave Macmillan London, 2020). Hal. 20

Lakshmi, V. V. Aruna Devi, D. And Jhansi Rani, K. P. 2020. *Wealth From Poultry Waste, Waste Management As Economic Industry Towards Circular Economy*, 2020. Doi: 10.1007/978-981-15- 1620-7_7

Littlewood, D., & Holt, D. Social Entrepreneurship in South Africa: Exploring the Influence of Environment. *Business and Society, 57(3), 2018. Pp. 525–561. https://doi.org/10.1177/0007650315613 293*

M. Anang Firmansyah dan Anita Roosmawarni. *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep*. Pasuruhan: Qiara Media, 2020. Hal. 4.

Margiono, A., & Feranita, F. *The past, present, and future of social entrepreneurship in Indonesia: A strategy to move the ecosystem forward. Entrepreneurial Connectivity: Network, Innovation and Strategy*

Perspectives, 2021. Hal. 29–40.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Hal. 143

Morseletto, P. *Targets for a Circular Economy*. (Resources, Conservation & Recycling, 2020). Hal. 153, 1-12

Muhadjir, Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000. Hal. 15

Mulyana, Budiarti, dan Fedriyansah. *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat*. Sumedang: Penerbit Niaga Muda, 2019.Hal. 59.

Mulyana, Nandang. Meilanni Budiarti, dan M. Fedriyansah. *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat.* Sumedang: Penerbit Niaga Muda, edisi ke-2, 2019. Hal. 57-58.

Nugroho, Rianto. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009. Hal. 619.

Nugroho, Rianto. *Public Policy (edisi revisi*). PT. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2009. Hal. 92

Nugroho, Rianto. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo, Tahun 2008. Hal.84

Nugroho, Rianto. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo, Tahun 2008. Hal.84

Pathak, S., & Mukherjee, S. Entrepreneurial ecosystem and social entrepreneurship: case studies of community-based craft from Kutch, India. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 15(3), 2020*. Hal. 350–374

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Peyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Hal.192

Purwati, A., Budiyanto, B., Suhermin, S., & Hamzah, M.The effect of innovation capability on business performance: The role of social capital and entrep reneurial leadership on SMEs in Indonesia. *Accounting, 2021*. Hal. 7(2),

323–330.

Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. Hal. 54.

Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. Hal. 2.

Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000. Hal. 31

Richard Swedberg. *Entrepreneurship: The Social Science View*. Oxford: Oxford University Press, 2000. Hal. 22.

Rusy dan Fathy. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1, 2019. Hal. 1-17*

Rusy dan Fathy. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1, 2019. Hal. 1-17.*

Santos, F. M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics, 111(3), 2012. Pp.335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012- 1413-4*

Santos, F. M. A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics, 111(3),2012. Pp. 335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1413-4*

Seelos, C., & Mair, J. *Social entrepreneurship-The contribution of individual entrepreneurs to sustainable development.* (IESE Business School, University of Navarra, Navarra, Spain, 2004). Hal. 12.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018. Hal.456

Taufik Amir. *Manajemen Strategi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hal. 192

Thoha, M. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PD.Batang Gadis, 1995.Hal 28

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008. Hal..3.

Wahab. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Hal. 153

Wang, W. (2022). *Toward Economic Growth and Value Creation Through Social Entrepreneurship: Modelling the Mediating Role of Innovation*. (Frontiers in Psychology, 2020). Hal. 13.

Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Hal. 33

Zhang, A. Et Al. 2019. Barriers to Smart Waste Management for A Circular Economy in China. *Journal of Cleaner Production, 2019. p.240. P. 118198. Doi: 10.1016/J.Jclepro.2019.118198*